



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2025

SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG



bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Seberang disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Samarinda Seberang atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. LKjIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kebijakan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Seberang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Seberang.



Samarinda, 09 Februari 2026
Camat Samarinda Seberang

ADITYA KOESPAYOGI, S.STP, M.A.P
Pembina TK.I (IV/b)
19860723 200412 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan "**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**" dapat digambarkan sebagai berikut:

- ❖ Sasaran yang diukur untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2025 yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah
- ❖ Program yang mendukung sasaran demi mewujudkan tujuan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" antara lain :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- ❖ Pada Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Kecamatan Samarinda seberang terbagi menjadi 2 (dua) Perjanjian Kinerja, yang mana Perjanjian Kinerja Murni 2025 masih merujuk kepada indikator lama yang berpedoman pada Renstra Kecamatan Samarinda seberang Periode 2021-2026, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 sudah merujuk kepada indikator baru yang sudah berpedoman pula pada Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029.
- ❖ **Target Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah 4,05 dan capaian realisasinya 4,29 sehingga capaian kinerjanya sebesar 105,93% atau bermakna Sangat Tinggi**
- ❖ Realisasi anggaran Kecamatan Samarinda Seberang mencapai 96,84% dengan pagu anggaran Rp 32.530.791.117,00 dan realisasi anggaran Rp 31.501.505.984,00 dan Masih adanya Efisiensi anggaran belanja Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.029.285.133,- atau 3,16 %.

- ❖ Penilaian Kinerja Organisasi (PKO), total Capaian Penilaian Kinerja (PK) Kecamatan Samarinda seberang Tahun 2025 sebesar 90,04% dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 juga sama dengan total capaian penilaian kinerja, yaitu sebesar 90,04%. Adapun Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Kecamatan Samarinda seberang Tahun 2025 adalah Baik.
- ❖ Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan, sebagaimana analisis pencapaian indikator sasaran disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2025 adalah Sangat Tinggi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	3
1.4 Sumber Daya Kecamatan Samarinda Seberang	14
1.5 Dasar Hukum	19
1.6 Sistematika Penulisan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Rencana Startegis Kecamatan Samarinda Seberang 2025-2029	21
2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025	27
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2 Realisasi Anggaran	50
3.3 Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)	54
BAB IV PENUTUP	56
LAMPIRAN	58
1. Lembar Asistensi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2026	
2. Perjanjian Kinerja	
3. Edalev	
4. Indikator kinerja Utama (IKU)	
5. Pengukuran Kinerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Seberang Berdasarkan Klasifikasi Aparatur.....	14
Tabel 1.2	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025.....	15
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Jangka Menengah Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029.....	23
Tabel 2.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025.....	24
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 Murni Berpedoman kepada RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang 2021-2026.....	28
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 Perubahan Berpedoman kepada RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang 2025-2029.....	29
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Samarinda seberang Periode 2025-2029.....	30
Tabel 3.1	T-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	33
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.....	34
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2023, 2024 dan 2025.....	35
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029.....	36
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.....	37
Tabel 3.6	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	40
Tabel 3.7	Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan maupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	41
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025.....	50
Tabel 3.9	Matriks Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Seberang.....	13
Gambar 2.1	Konsep Teknis Renstra perangkat Daerah.....	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja tahunan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, Kecamatan Samarinda Seberang menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi petanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai suatu tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Samarinda Seberang) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Samarinda Seberang dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Samarinda Seberang;
3. Bahan evaluasi untuk menyusun rencana kegiatan dan Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang pada tahun berikutnya.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Samarinda Seberang merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah di wilayah kecamatan. Kecamatan ini berperan sebagai ujung tombak pelayanan publik, koordinasi pemerintahan, serta pembinaan masyarakat di tingkat kecamatan.

Kecamatan Samarinda Seberang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 memiliki luas 13,51 Km² dan merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kecamatan se-Kota Samarinda. Secara geografis terletak antara 0° 21' 18" - 1° 9' 6" LS dan 116° 15' 36"-1170° 24' 16" BT dengan batas-batas wilayah yaitu :

- Utara : Berbatasan dengan Sungai Mahakam
- Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Palaran / Sungai Mahakam
- Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan Ilir
- Barat : Berbatasan dengan Sungai Mahakam

Terhitung awal Tahun 2015, jumlah kelurahan yang ada dibawah Kecamatan Samarinda Seberang bertambah menjadi 6 (enam) kelurahan yaitu :

- 1) Kelurahan Sungai Keledang;
- 2) Kelurahan Baqa;
- 3) Kelurahan Mesjid;
- 4) Kelurahan Mangkupalas;
- 5) Kelurahan Tenun; dan
- 6) Kelurahan Gunung Panjang.

1.3 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

1. Tugas

Sesuai Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 Tanggal 22 September 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, organisasi Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Organisasi Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang – undangan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan instansi vertikal agar bersinergis;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala Daerah melalui Sekda secara berjenjang.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi satuan kerja perangkat daerah Kecamatan terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Program
 - 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Seksi Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi yang terpadu;
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi dan pelayanan teknis kepada seluruh perangkat pemerintah Kecamatan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah;
- i. Pembinaan tugas operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan kantor;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kantor;
- c. Persiapan rancangan dan penilaian atas peraturan perundang-

- undangan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan / ketatausahaan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
 - e. Pengumpulan dan pengolahan bahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Camat;
 - f. Pengumpulan, penyusunan dan pengajuan serta memberikan atau menyebarluaskan informasi pelayanan kepada masyarakat;
 - g. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unsur pelaksanaan administrasi yang membantu Sekretaris Camat, yaitu:

- *Sub Bagian Keuangan* yang mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. Pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran;
 - b. Perbendaharaan;
 - c. Verifikasi; dan
 - d. Akuntansi keuangan.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi

- a. Penyiapan dokumen/bahan teknis bidang keuangan;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penggajian;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah;
 - d. Penghimpunan data dan penyusunan rencana anggaran Kecamatan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan dengan sektor terkait;
 - f. Pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi di bidang keuangan;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan kegiatan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- *Sub Bagian Perencanaan Program* mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program;
- b. Monitoring;
- c. Evaluasi; dan
- d. Pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan Program dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Kecamatan;
 - b. Penyusunan rencana strategi dan rencana kerja tahunan Kecamatan;
 - c. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat/standar pelayanan publik dan/atau lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik;
 - d. Penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah Kecamatan;
 - e. Penyusunan jadwal kegiatan rutin Kecamatan;
 - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan:
- a. Kegiatan Pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian dan ketatalaksanaan;
 - b. Perlengkapan dan pemeliharaan; dan
 - c. Humas dan pengaduan masyarakat.

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
- b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan;
- c. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Penyelenggaraan administrasi pengaduan masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b. Perumusan kebijakan;
- c. Koordinasi;
- d. Perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan umum;
- e. Ketentraman dan ketertiban.

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
- b. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja bidang lain bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
- d. Pelaksanaan pencatatan monografi Kecamatan;
- e. Pelaksanaan administrasi pemilihan umum;
- f. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban;
- h. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b. Perumusan kebijakan;
- c. Koordinasi;

- d. Perencanaan program dan pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja bidang lain bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b. Perumusan kebijakan;
- c. Koordinasi;
- d. Perencanaan program dan pelaporan bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan penyuluhan bidang kebersihan, penghijauan dan lingkungan hidup;

- c. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja bidang lain bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan:

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b. Perumusan kebijakan;
- c. Koordinasi;
- d. Perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
- c. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sarana prasarana di wilayah Kecamatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja bidang lain bidang perekonomian dan pembangunan;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan;
- b. Perumusan kebijakan;
- c. Koordinasi;
- d. Perencanaan program dan pelaporan bidang pelayanan umum.

Seksi Pelayanan Umum dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

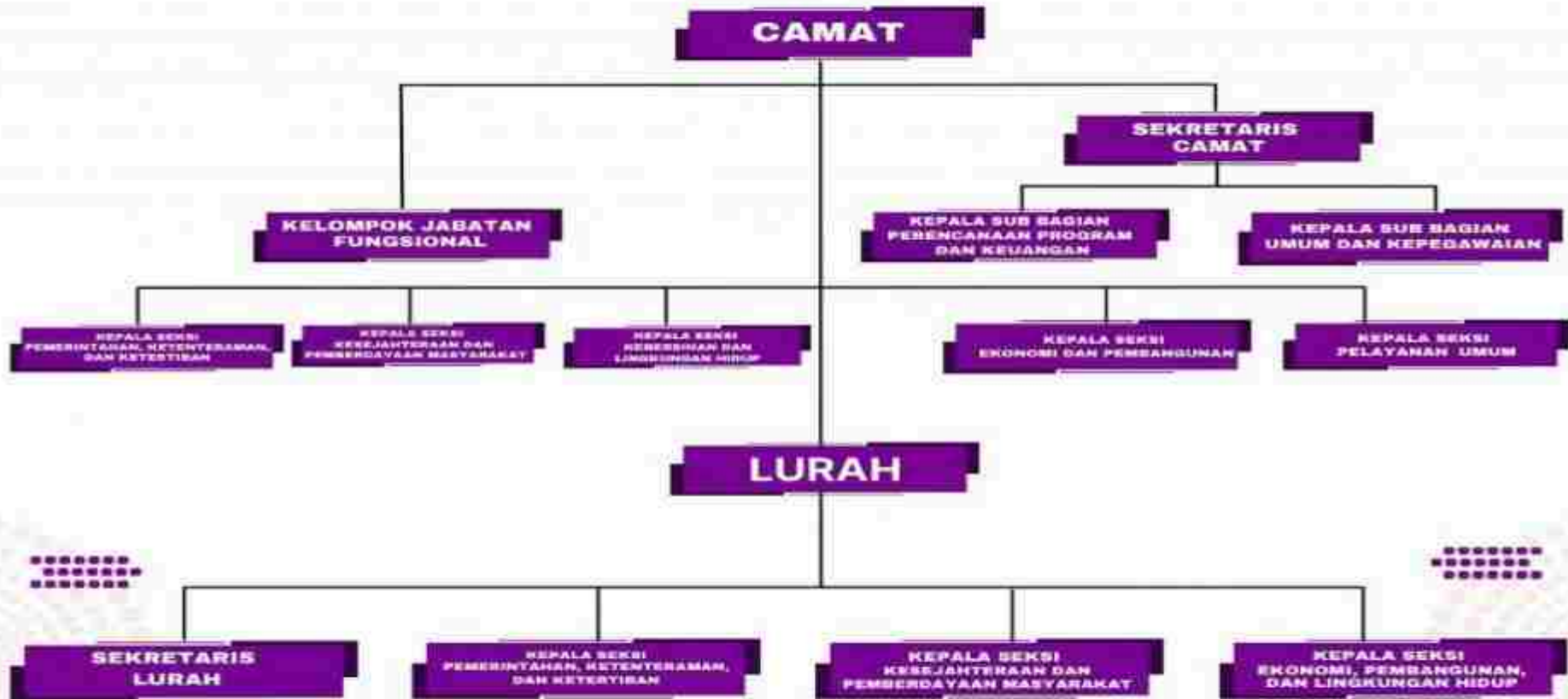
- a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pelayanan umum;
- b. Pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan legalisasi;
- c. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan pelayanan informasi, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Penyiapan bahan penyusunan data statistik demografi Kecamatan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja bidang lain bidang pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
2. Setiap kelompok jabatan dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat secara berjenjang melalui Sekretaris.
3. Jumlah jabatan Fungsional ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG



Dasar : Peraturan Walikota Samarinda
Nomor : 57 Tahun 2016
Tanggal : 20 Oktober 2016

1.4 Sumber Daya Kecamatan Samarinda Seberang

Berdasarkan susunan kepegawaian yang dimiliki Kecamatan Samarinda Seberang guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut:

1. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Seberang

Sampai dengan akhir Desember tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Samarinda Seberang Sebanyak 63 Orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 22 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 34 Orang, dan Jumlah Seluruh Pegawai Kecamatan Samarinda Seberang dan 6 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Samarinda Seberang sebanyak 119 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Seberang Berdasarkan Klasifikasi Aparatur

No.	Unit	Klasifikasi				Jumlah
		PNS	PPPK	P3K Paruh Waktu	PJLP	
1.	Kecamatan Samarinda Seberang	16	7	8	26	57
2.	Kelurahan Baqa	8	2	3	1	14
3.	Kelurahan Mesjid	6	2	1	3	12
4.	Kelurahan Sungai Keledang	7	4	1	2	14
5.	Kelurahan Mangkupalas	7	3	2	0	12
6.	Kelurahan Tenun Samarinda	6	2	5	1	14
7.	Kelurahan Gunung Panjang	9	2	2	2	15
Jumlah		59	22	22	35	138

2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Seberang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, kendaraan dinas, rumah dinas camat dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya masih dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sampai dengan tahun 2025 sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Samarinda Seberang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2 Data Sarana dan Prasarana
Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025**

No	Jenis Sarana & Prasarana Yang Tersedia	Jumlah		Kondisi
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Bidang	Baik
2.	Rumah Negara Gol I Lain-lain	2	Bidang	Baik
3.	Bangunan Gudang Lain-lain	1	Bidang	Baik
4.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Bidang	Baik
5.	Sepeda Motor	7	Unit	1 Rusak Berat, 6 Baik
6.	Pahatan Batu-batuan	16	Buah	Baik
7.	Tanaman Perkebunan Lain-lain	100	Buah	Rusak
8.	Meja Kayu	1	Buah	Rusak Berat
9.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2	Bidang	Baik
10.	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	1	Bidang	Baik
11.	Piala	1	Buah	Baik
12.	Tanda Penghargaan Lain-lain	1	Buah	Baik
13.	Mobil Unit Monitoring Frekwensi	1	Unit	Baik
14.	Generator Engineering	1	Unit	Rusak Berat

No	Jenis Sarana & Prasarana Yang Tersedia	Jumlah		Kondisi
15.	Personal Komputer (Laboratorium)	1	Unit	Rusak Berat
16.	Mesin Ketik Elektronik	1	Unit	Rusak Berat
17.	Filling Besi/Metal	8	Unit	1 Rusak Berat, 7 Baik
18.	Kursi Tamu	5	Buah	1 Rusak Berat, 4 Baik
19.	Lemari Kaca	6	Buah	Baik
20.	Kursi Besi/Metal	6	Buah	Baik
21.	Meja Rapat	6	Buah	Baik
22.	Meja Biro	2	Buah	Baik
23.	Kursi Putar	10	Buah	Rusak Berat
24.	Sofa	1	Buah	Rusak Berat
25.	AC Unit	27	Unit	5 Rusak Berat, 22 Baik
26.	Kipas Angin	10	Unit	1 Rusak Berat, 9 Baik
27.	Personal Komputer Lain-lain	2	Unit	Rusak Berat
28.	Line Printer	1	Buah	Baik
29.	Hard Disk	2	Buah	Rusak Berat
30.	Printer	34	Buah	2 Rusak Berat, 32 Baik
31.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	7	Buah	Baik
32.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	Buah	Baik
33.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	11	Buah	1 Rusak Berat, 10 Baik
34.	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1	Buah	Baik
35.	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	3	Buah	Baik
36.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Buah	Rusak Berat
37.	White Board	4	Buah	Rusak Berat
38.	Meja Tulis	2	Buah	Rusak Berat
39.	Meja Tik	20	Buah	Rusak Berat
40.	Kompur Gas	1	Buah	Baik

No	Jenis Sarana & Prasarana Yang Tersedia	Jumlah		Kondisi
41.	Tabung Gas	1	Buah	Baik
42.	Televisi	3	Buah	Baik
43.	Camera Film	3	Buah	Baik
44.	Dispenser	6	Buah	Baik
45.	Pot Bunga	1	Buah	Baik
46.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	Buah	Baik
47.	Note Book	2	Buah	Baik
48.	Console Unit	1	Buah	Baik
49.	Keyboard	1	Buah	Baik
50.	Computer Compatible	2	Buah	Baik
51.	Monitor	1	Buah	Baik
52.	Modem	1	Buah	Baik
53.	Peralatan Jaringan Lain-lain	3	Buah	Baik
54.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
55.	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	2	Buah	Baik
56.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
57.	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	7	Buah	Rusak Berat
58.	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	30	Buah	10 Rusak Berat, 20 Baik
59.	Proyektor + Attachment	1	Buah	Baik
60.	Compact Disc. Player	1	Buah	Baik
61.	Rak Peralatan	2	Buah	Rusak Berat
62.	Amplifier	1	Buah	Baik
63.	Sound System	3	Buah	1 Rusak Berat, 2 Baik
64.	Instalasi Gas Medis	1	Buah	Rusak Berat
65.	Station Wagon	1	Buah	Baik
66.	Alat Penghancur Kertas	2	Buah	Baik
67.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	4	Buah	Baik
68.	Meubiler Lainnya	1	Buah	Baik

No	Jenis Sarana & Prasarana Yang Tersedia	Jumlah		Kondisi
69.	Lemari Es	2	Buah	Baik
70.	Komputer (P.C Unit)	16	Buah	Baik
71.	CPU	1	Buah	Baik
72.	Peralatan studio Visual Lain-lain	1	Buah	Baik
73.	Lemari Besi	1	Buah	Baik
74.	Mesin Absensi	1	Buah	Baik
75.	Lemari kayu	2	Buah	Baik
76.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	2	Buah	Baik
77.	Lensa Kamera	1	Buah	Baik
78.	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	2	Buah	Baik
79.	Lap Top	5	Unit	Baik
80.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	Unit	Baik
81.	Camera Digital	1	Buah	Baik
82.	Handy Talky	6	Buah	Baik
83.	Meja Kerja	4	Buah	Baik
84.	Scanner	1	Buah	Baik
85.	Overhead Projektor / LCD	1	Buah	Baik
86.	Gordyn/Kray	7	Buah	Baik

Sumber Data : Buku Inventaris

Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki tersebut, maka kegiatan administrasi Kantor Kecamatan Samarinda Seberang dapat berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan kegiatan operasional terutama yang berkaitan dengan fasilitas kendaraan dinas roda 2 masih terbatas, sehingga masih belum mampu menunjang kegiatan yang dilaksanakan secara maksimal, mengingat luasnya wilayah dan padatnya volume kegiatan yang dilaksanakan.

1.5 Dasar Hukum

LKjIP Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda tahun 2025 ini disusun berdasarkan beberapa Dasar Hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Peraturan Wali Kota Samarinda No 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi AKIP Pemerintah Kota Samarinda;
9. Surat Deputi RB Kunwas Kementerian PANRB Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025;
10. Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor : 000.8.6.3/4963/013.02 Tentang Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Surat KemenPANRB Nomor B/3/AA.99/2026 Tentang Mekanisme Penyampaian Data dan Dokumen Kinerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2025 ini, didasari dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang mana terurai sebagaimana dijelaskan Sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi Gambaran umum, Tugas dan Fungsi, aspek strategis yang di hadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja Organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan di lakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang dibuat oleh Kecamatan Samarinda Seberang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Seberang dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Bagian-bagian Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda yang berkesinambungan dengan VISI, MISI Kota Samarinda, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Visi**

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda turut mendukung visi:

“Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”

menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk Kecamatan Samarinda Seberang.

- **Misi**

Menuju pencapaian visi tersebut maka di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda turut andil dalam pencapaian Misi 5 (Lima) RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.”

- **Tujuan Rencana Strategis**

Berdasarkan telaah visi dan misi RPJMD sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu disusun tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi guna memperjelas pencapaian

tujuan yang ingin diraih. Tujuan dari Kecamatan Samarinda Seberang untuk jangka waktu lima tahun mendatang (2025-2029) sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, Kecamatan Samarinda Seberang berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut.

- **Sasaran Rencana Strategis**

Berdasarkan tujuan rencana strategis yang telah diuraikan di atas, maka disusun sasaran dari pernyataan tujuan strategis guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Sasaran dari Kecamatan Samarinda Seberang sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah”

Sasaran ini menunjukkan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan kelurahan, yang merupakan ujung tombak dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Konsep Teknis Renstra perangkat Daerah



Secara ringkas tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Jangka Menengah Kecamatan Samarinda Seberang
Periode 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN KINERJA PADA TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang											
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)	4,26	4,30	4,50	4,55	4,60	4,65	4,75	Pemerintah Kota Samarinda
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)	4,01	4,05	4,00	4,02	4,05	4,08	4,10	Kecamatan Samarinda Seberang

● **Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Kecamatan Samarinda Samarinda Seberang pada tahun 2025 ini, terdiri dari 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Fasilitas Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

No. 1	Program 2	Kegiatan 3	Sub Kegiatan 4
			Kantor 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kel. Baqa 3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kel. Mesjid 4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kel. Sungai Keledang 5. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kel. Mangkupalas 6. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kel. Tenun Samarinda 7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kel. Gunung Panjang
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baqa 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mesjid 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sungai Keledang 5. Pembangunan Sarana dan

No. 1	Program 2	Kegiatan 3	Sub Kegiatan 4
			6. Prasarana Kelurahan mangkupalas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tenun Samarinda 7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Panjang 8. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baqa 9. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mesjid 10. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang 11. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkupalas 12. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda 13. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang 14. Evaluasi Kelurahan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kecamatan dan Kelurahan	1. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Kecamatan Samarinda Seberang) 2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Baqa) 3. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Mesjid) 4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan sungai Keledang) 5. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Mangkupalas) 6. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Tenun)

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
			7. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Gunung Panjang)

2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penting yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja mencakup indikator kinerja yang jelas dan terukur. Melalui perjanjian ini, terwujudlah komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur, berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja tidak hanya mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun berjalan, tetapi juga hasil (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja di Kecamatan Samarinda Seberang untuk tahun 2025 juga mencakup target kinerja yang berkelanjutan, yang dihasilkan dari kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan langkah strategis yang memiliki beberapa tujuan penting yang mendasar bagi pengelolaan pemerintahan di Kecamatan Samarinda Seberang. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain :

- ❖ **Wujud Komitmen** : Sebagai bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Hal ini menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
- ❖ **Tolak Ukur Kinerja** : merupakan alat yang digunakan untuk

mengukur kinerja yang jelas sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

- ❖ **Dasar Penilaian :** Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja juga menjadi dasar untuk pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan sanksi bagi yang tidak memenuhi target.

Pada Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang terbagi menjadi 2 (dua) Perjanjian Kinerja, yang mana Perjanjian Kinerja Murni 2025 masih merujuk kepada indikator lama yang berpedoman pada Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2021-2026, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 sudah merujuk kepada indikator baru yang sudah berpedoman pada Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029. Lebih jelasnya disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 Murni Berpedoman Kepada RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,30
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda Seberang	Persen	84,00

Program

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran

- Rp. 1.137.000.000,00
- Rp. 140.000.000,00

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Murni Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 yang masih merujuk kepada Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2021-2026 memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 Perubahan Berpedoman Kepada RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	4,05

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 15.443.104.254,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.549.732.748,00
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 73.162.000,00

Sumber Data Anggaran : DPA 2025 di SIPD RI

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 yang sudah merujuk kepada Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 lebih sederhana dengan hanya memiliki 1 (satu) Sasaran Strategis dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandate (core business) yang diemban.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Samarinda seberang yang merujuk kepada Renstra terbaru Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Dasar Hukum	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 25 Tahun 2009 Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023 Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan Publik Merupakan Tugas & Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya : <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Pelayanan Publik, Profesionalitas SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, Inovasi Pelayanan Publik. 	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Samarinda. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perangkat (IKU) SKPD pada Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi, keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025.

- a. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna

mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

pengukuran kinerja Kecamatan Samarinda Seberang dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil utama dalam kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat capaian kinerja organisasi dilakukan pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara, di antaranya :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional / Provinsi;
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
7. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berikutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi pada Entitas Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah di Kota Samarinda juga menyertakan Matriks Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada BAB III Akuntabilitas Kinerja ini. Kemudian, dalam penghitungan capaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik indikator kinerja yang memiliki kondisi :

1. Semakin tinggi realisasinya akan menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Target Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Samarinda Seberang dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Kecamatan Samarinda Seberang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1 T-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Untuk evaluasi capaian kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis Kecamatan Samarinda Seberang, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	4,05	4,29	105,93 %	Sangat Tinggi

2. Analisa Pencapaian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang

Untuk Memperoleh Capaian Kinerja, Maka Perhitungannya Sebagai Berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{4,29}{4,05} \times 100 = 105,93 \%$$

Realisasi target kinerja Kecamatan Samarinda Seberang pada tahun 2025 yaitu sebesar 4,29. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja Sangat Tinggi. Angka 4,29 ini diperoleh dari Keputusan Wali Kota Samarinda yang dapat dilihat pada tautan link berikut : https://drive.google.com/file/d/1WCoARepwEc4S07QSoLck40SGkw01p-Tm/view?usp=drive_link

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa Capaian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang Sebesar 105,93 %. Memiliki Makna Sangat Tinggi dan tentu itu berarti Sangat baik. Realisasi Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang telah Mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2023, 2024 dan 2025

CAPAIN KINERJA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG PERIODE 2025-2029 (BARU)											
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,81	5,30	110,19%	4,01	4,53	112,97%	4,05	4,29	105,93%
CAPAIN KINERJA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG PERIODE 2021-2026 (LAMA)											
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,30	87,85	102,99 %	85,80	93,35	108,80 %	86,30	90,80 %	105,21 %
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda Seberang	82,00	100,00	121,95 %	83,00	100,00	120,48 %	84,00	100,00	119,05 %

3. Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 dengan Target Jangka menengah pada RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA (Tahun 2030)	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	4,75	4,29	90,32 %

Dari tabel diatas dapat dilihat pada indikator kineja Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah memiliki target akhir 4,75 dengan realisasi 4,29 atau 90,32% dan Pencapaian targetnya belum melampaui Target Akhir Renstra.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang dengan Standar Nasional/Provinsi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Samarinda Seberang terus berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Tahun ini, capaian kinerja Kecamatan Samarinda Seberang akan dibandingkan dengan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang
dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025	Realisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	Persentase Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/5*100
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)	4,29	4,75	90,32 %

Realisasi IPP Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dapat dilihat Melalui Link Berikut :

<https://ro-organisasi.jatimprov.go.id/news/detail/584-indeks-pelayanan-publik-jatim-capai-475-tertinggi-nasional-2025-gubernur-khofifah-tegaskan-komitmen-tingkatkan-kinerja-pelayanan-publik-di-jawa-timur.html>

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan Capaian kinerja Samarinda Seberang dengan Standar Provinsi, maka diperoleh kesimpulan yaitu capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Lebih Tinggi dari Capaian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang.

5. Analisis Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Atau peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dari Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah terdapat realisasi +5.93 % Lebih dari target. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran indikator kinerja di kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Sebagai Berikut:

1. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor Pendukung

- a. Adanya pegawai yang memiliki kompetensi, pengalaman, serta pemahaman terhadap tugas dan fungsi organisasi.
- b. Implementasi aplikasi administrasi dan layanan digital yang membantu efisiensi kerja
- c. Adanya dukungan anggaran operasional dan program kegiatan dari Pemerintah Kota Samarinda
- d. Kepemimpinan camat dan jajaran yang memiliki komitmen terhadap peningkatan pelayanan publik
- e. Peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan serta kontrol terhadap pelayanan public
- f. Koordinasi yang baik antara kecamatan, kelurahan, dan instansi terkait lainnya

Faktor Penghambat

- a. Masih terdapat kekurangan tenaga di bidang teknis atau pelayanan langsung ke masyarakat.
- b. Anggaran belum sepenuhnya mencukupi untuk inovasi dan pengembangan pelayanan.
- c. Beberapa pegawai kurang terbiasa dengan sistem digital atau perubahan SOP pelayanan.
- d. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui layanan atau inovasi yang tersedia di kecamatan.

Rencana Tindak Lanjut

- a. Pelatihan, workshop, dan pendampingan untuk pegawai agar lebih adaptif dan professional
- b. Pengadaan dan perbaikan fasilitas kerja dan pelayanan masyarakat
- c. Menyebarluaskan informasi melalui media sosial, spanduk, maupun pertemuan langsung untuk memperkenalkan layanan.

2. Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan

Faktor Pendukung

- a. Lembaga seperti RT, LPM, Karang Taruna, PKK berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat
- b. Program bantuan sosial, pelatihan kewirausahaan, dan pemberdayaan UMKM mendukung peningkatan kualitas hidup
- c. Komitmen untuk mengembangkan potensi masyarakat melalui kegiatan partisipatif dan pemberdayaan

Faktor Penghambat

- a. Terbatasnya kemampuan dasar masyarakat dalam mengakses informasi dan pelatihan
- b. Tidak semua warga aktif dalam kegiatan kelurahan karena kurangnya kesadaran akan manfaatnya
- c. Pembiayaan program peningkatan kapasitas masyarakat masih terbatas.

Rencana Tindak Lanjut

- a. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan potensi lokal agar intervensi lebih tepat sasaran
- b. Memanfaatkan anggaran secara efisien untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Menggunakan media lokal, digital, dan kegiatan sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program yang tersedia

Dengan mengambil langkah-langkah ini secara sistematis dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengatasi penghambat capaian kinerja di Kecamatan Samarinda Seberang dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tabel di bawah ini akan disajikan data Capaian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang berdasarkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Terutama Anggaran di Tahun 2025 dengan 2 tahun sebelumnya.

Tabel 3.6
Analisi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis RENSTRA 2025-2029	Anggaran Tahun 2023				Anggaran Tahun 2024				Anggaran Tahun 2025			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	27.619.688.239	22.402.528.467	81,11 %	18,89 %	33.163.581.568	31.909.228.999	96,22 %	3,78 %	32.530.791.117	29.876.915.717	91,84 %	8,16 %

Dari tabel yang tersaji di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, efisiensi anggaran terbesar Kecamatan Samarinda Seberang terjadi pada tahun 2024 yaitu 3,78 %

7. Analisis Program /Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan maupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada tabel yang tersaji di bawah ini akan disajikan data Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan maupun Kegagalan Pencapaian Kinerja di Kecamatan Samarinda Seberang pada Tahun 2025.

Tabel 3.7

Analisi Program /Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan maupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sasaran strategis/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pengukuran Kinerja Tahun 2025				Kinerja Penganggaran Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Penilaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	4,05	4,29	105,93	Sangat Tinggi	22.536.791.117	29.876.915.717	91,84 %	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	72,75	N/A	N/A	N/A	15.443.104.254	12.857.523.634	83,26	Tinggi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,30	86,30	100	Sangat Tinggi				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun sesuai SOP	%	95,50	95,50	100	Sangat Tinggi	200.418.200	200.325.964	99,95	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	100	Sangat Tinggi	105.058.200	105.058.200	100	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1	1	100	Sangat Tinggi	50.000.000	49.970.000	99,94	Sangat Tinggi

Secara strategis/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pengukuran Kinerja Tahun 2025				Kinerja Penganggaran Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Penilaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100	Sangat Tinggi	45,360,000	45,297,764	99.86	Sangat Tinggi
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	95.50	95.50	100	Sangat Tinggi	12,429,660,124	10,066,393,084	80.99	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	91	91	100	Sangat Tinggi	10,797,470,124	8,677,298,667	80.36	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	14	14	100	Sangat Tinggi	1,604,696,000	1,380,497,501	86.03	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5	100	Sangat Tinggi	27,494,000	8,596,916	31.27	Sangat Rendah
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	%	95.50	95.50	100	Sangat Tinggi	614,935,300	606,071,660	98.56	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	Sangat Tinggi	10,000,000	10,000,000	100	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	Sangat Tinggi	517,000,000	508,244,260	98.31	Sangat Tinggi

Sasaran strategis/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pengukuran Kinerja Tahun 2025				Kinerja Penganggaran Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Penilaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	Sangat Tinggi	2,208,000	2,200,000	99.64	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100	Sangat Tinggi	24,999,800	24,900,000	99.60	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	84	84	100	Sangat Tinggi	3,000,000	3,000,000	100	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	Sangat Tinggi	12,000,000	12,000,000	100	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	Sangat Tinggi	45,727,500	45,727,400	100	Sangat Tinggi
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	97.25	97.25	100	Sangat Tinggi	1,037,324,500	882,549,988	85.08	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	2	100	Sangat Tinggi	241,324,500	191,229,988	79.24	Tinggi
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	100	Sangat Tinggi	134,000,000	61,500,000	45.90	Sangat Rendah
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	6	100	Sangat Tinggi	662,000,000	629,820,000	95.14	Sangat Tinggi
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	98.15	98.15	100	Sangat Tinggi	516,184,130	505,849,516	98.00	Sangat Tinggi

Sasaran strategis/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pengukuran Kinerja Tahun 2025				Kinerja Penganggaran Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Penilaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100	Sangat Tinggi	449,684,130	439,949,516	97.84	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	Sangat Tinggi	12,500,000	11,900,000	95.20	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	Sangat Tinggi	54,000,000	54,000,000	100	Sangat Tinggi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	97.50	97.50	100	Sangat Tinggi	644,582,000	596,333,422	92.51	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	27	27	100	Sangat Tinggi	196,500,000	150,751,822	76.72	Tinggi
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	100	Sangat Tinggi	114,000,000	111,530,000	97.83	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	91	91	100	Sangat Tinggi	104,900,000	104,900,000	100	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	9	9	100	Sangat Tinggi	229,182,000	229,151,600	99.99	Sangat Tinggi

Sasaran strategis/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pengukuran Kinerja Tahun 2025				Kinerja Penganggaran Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Penilaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	%	91.05	91.05	100	Sangat Tinggi	2,724,047,248	2,692,569,856	98.84	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14	14	100	Sangat Tinggi	2,724,047,248	2,692,569,856	98.84	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	100	Sangat Tinggi	1,549,732,748	1,535,464,446	99.08	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Baqa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	100	Sangat Tinggi	362,824,750	362,668,700	99.96	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Masjid	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	100	Sangat Tinggi	158,550,000	144,777,950	91.31	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Sungai Keledang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	100	Sangat Tinggi	163,545,750	160,474,430	98.12	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Mangkupalas	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	100	Sangat Tinggi	162,800,000	162,799,430	100	Sangat Tinggi

Sasaran strategis/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pengukuran Kinerja Tahun 2025				Kinerja Penganggaran Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Penilaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Tenun Samarinda	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	100	Sangat Tinggi	163,422,000	163,312,950	99.93	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kelurahan Gunung Panjang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	100	Sangat Tinggi	163,172,000	163,071,950	99.94	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	%	95.00	95.00	100	Sangat Tinggi	14,363,639,615	14,326,822,227	99.74	Sangat Tinggi
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	141	141	100	Sangat Tinggi	14,043,801,665	14,030,149,977	99.9	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Baqa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	22	22	100	Sangat Tinggi	1,592,800,000	1,592,800,000	100	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Mesjid	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	21	21	100	Sangat Tinggi	1,522,800,000	1,522,740,000	100	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sungai Keledang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	36	36	100	Sangat Tinggi	2,580,937,500	2,580,540,000	99.98	Sangat Tinggi

Sasaran strategis/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pengukuran Kinerja Tahun 2025				Kinerja Penganggaran Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Penilaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Mangkupafas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	19	19	100	Sangat Tinggi	1,382,737,500	1,382,415,000	99.98	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Tenun Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	13	13	100	Sangat Tinggi	979,600,000	979,510,000	99.99	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Gunung Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	8	8	100	Sangat Tinggi	604,600,000	604,370,000	99.96	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Baqa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2	2	100	Sangat Tinggi	973,585,500	973,585,500	100	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Masjid	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2	2	100	Sangat Tinggi	931,358,886	931,358,886	100	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sungai Keledang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3	3	100	Sangat Tinggi	1,572,912,693	1,572,671,091	99.98	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Mangkupafas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2	2	100	Sangat Tinggi	846,848,994	845,829,000	99.88	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Tenun Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1	100	Sangat Tinggi	618,532,208	618,314,600	99.96	Sangat Tinggi

Sasaran strategis/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pengukuran Kinerja Tahun 2025				Kinerja Penganggaran Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Penilaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Gunung Panjang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1	100	Sangat Tinggi	426,270,384	426,015,900	99.94	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	5	5	100	Sangat Tinggi	10,818,000	0	0	Sangat Rendah
Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	24	24	100	Sangat Tinggi	319,837,950	296,672,250	92.76	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	171	171	100	Sangat Tinggi	62,344,000	59,917,500	96.11	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Baqa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	30	30	100	Sangat Tinggi	40,943,000	34,144,000	83.39	Tinggi
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Mesjid	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	20	20	100	Sangat Tinggi	42,420,500	37,646,500	88.75	Sangat Tinggi

Sasaran strategis/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pengukuran Kinerja Tahun 2025				Kinerja Penganggaran Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Penilaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sungai Keledang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	29	29	100	Sangat Tinggi	39,155,250	38,555,250	98.47	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Mangkupalas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	43	43	100	Sangat Tinggi	44,302,200	35,755,000	80.71	Tinggi
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Tenun Samarinda	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	20	20	100	Sangat Tinggi	40,673,000	40,654,000	99.95	Sangat Tinggi
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Gunung Panjang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	29	29	100	Sangat Tinggi	50,000,000	50,000,000	100	Sangat Tinggi

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Samarinda Seberang pada tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah. Data tabel tersebut, pembiayaan dari APBD Tahun 2025 berjumlah Pagu Perubahan Tahun 2025 Rp. 32.530.791.117,00 terealisasi sebesar Rp. 31.501.505.984,00 dengan persentase realisasi 96,84 % atau Efisiensi 3,16 % Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025

No. (1)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (2)	Anggaran (Rp) (3)	Realisasi (Rp) (4)	Persen (%) (5)
	Kecamatan Samarinda Seberang	Rp 32.530.791.117,00	Rp 31.501.505.984,00	96,84 %
	Kecamatan	Rp 17.065.999.002,00	Rp 16.106.213.097,00	94,38%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.443.104.254,00	Rp 14.505.983.651,00	93,93 %
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 200.418.200,00	Rp 200.324.953,00	99,95%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 105.058.200,00	Rp 105.058.189,00	100,00%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 50.000.000,00	Rp 49.969.000,00	99,94%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 45.360.000,00	Rp 45.297.764,00	99,86%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 12.429.660.124,00	Rp 11.714.946.582,00	94,25%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 10.797.470.124,00	Rp 10.325.852.165,00	95,63%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1.604.696.000,00	Rp 1.380.497.501,00	86,03%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 27.494.000,00	Rp 8.596.916,00	31,27%

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 614.935.300,00	Rp 606.081.759,00	98,56%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 517.000.000,00	Rp 508.254.259,00	98,31%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 2.208.000,00	Rp 2.200.000,00	99,64%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 24.999.800,00	Rp 24.900.000,00	99,60%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	100,00%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00	100,00%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 45.727.500,00	Rp 45.727.500,00	100,00%
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.037.324.500,00	Rp 882.449.988,00	85,07%
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 241.324.500,00	Rp 191.129.988,00	79,20%
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 662.000.000,00	Rp 629.820.000,00	95,14%
	Sub Kegiatan Pengadan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 134.000.000,00	Rp 61.500.000,00	45,90%
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 516.184.130,00	Rp 505.846.947,00	98,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp 449.684.130,00	Rp 439.946.947,00	97,83%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp 12.500.000,00	Rp 11.900.000,00	95,20%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 54.000.000,00	Rp 54.000.000,00	100,00%

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 644.582.000,00	Rp 596.333.422,00	92,51%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 196.500.000,00	Rp 150.751.822,00	76,72%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 114.000.000,00	Rp 111.530.000,00	97,83%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 104.900.000,00	Rp 104.900.000,00	100,00%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 229.182.000,00	Rp 229.151.600,00	99,99%
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 1.549.732.748,00	Rp 1.527.101.946,00	98,54%
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 1.549.732.748,00	Rp 1.527.101.946,00	98,54%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 1.549.732.748,00	Rp 1.527.101.946,00	98,54%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Baqa	Rp 362.824.750,00	Rp 362.668.700,00	99,96%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Mesjid	Rp 158.550.000,00	Rp 144.777.950,00	91,31%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sungai Keledang	Rp 163.545.750,00	Rp 136.955.430,00	83,74%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Mangkupalas	Rp 162.800.000,00	Rp 162.799.430,00	100,00%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tenun Samarinda	Rp 163.422.000,00	Rp 163.312.950,00	99,93%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gunung Panjang	Rp 163.172.000,00	Rp 163.071.950,00	99,94%

No. (1)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (2)	Anggaran (Rp) (3)	Realisasi (Rp) (4)	Persen (%) (5)
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 73.162.000,00	Rp 73.127.500,00	99,95%
1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 10.818.000,00	Rp 10.818.000,00	100,00%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baqa	Rp 1.592.800.000,00	Rp 1.592.800.000,00	100,00%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mesjid	Rp 1.522.800.000,00	Rp 1.522.740.000,00	100,00%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Keledang	Rp 2.580.937.500,00	Rp 2.580.540.000,00	99,98%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangkupalas	Rp 1.382.737.500,00	Rp 1.382.415.000,00	99,98%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tenun Samarinda	Rp 979.600.000,00	Rp 979.510.000,00	99,99%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Panjang	Rp 604.600.000,00	Rp 604.370.000,00	99,96%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baqa	Rp 973.585.500,00	Rp 973.585.500,00	100,00%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mesjid	Rp 931.358.886,00	Rp 931.358.886,00	100,00%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang	Rp 1.572.912.693,00	Rp 1.572.668.091,00	99,98%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkupalas	Rp 846.848.994,00	Rp 845.829.000,00	99,88%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda	Rp 618.532.208,00	Rp 618.314.600,00	99,96%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang	Rp 426.270.384,00	Rp 426.015.900,00	99,94%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Rp 10.818.000,00	Rp 10.818.000,00	100%

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)		Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp	62.344.000,00	Rp	62.309.500,00	99,94%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kecamatan Samarinda Seberang	Rp	62.344.000,00	Rp	62.309.500,00	99,94%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Baqa	Rp	40.943.000,00	Rp	34.144.000,00	83,39%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Mesjid	Rp	42.420.500,00	Rp	37.646.500,00	88,75%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang	Rp	39.155.250,00	Rp	33.360.000,00	85,20%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Mangkupalas	Rp	44.302.200,00	Rp	35.755.000,00	80,71%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda	Rp	40.673.000,00	Rp	40.654.000,00	99,95%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Gunung Panjang	Rp	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00	100,00%

3.3 Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi pada Entitas Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah di Kota Samarinda, termasuk Kecamatan Samarinda Seberang wajib menyertakan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) berupa matriks pada BAB III Laporan Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Kecamatan Samarinda Seberang menyajikan PKO Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada Tabel Matriks di bawah ini :

Tabel 3.9
Matriks Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))	Nilai SAKIP
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	4.05	4.29	105.93%	105.93%	15%	90.04%	69.50
Total Capaian PK (4)								90.04%	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)								90.04%	
Predikat PKO (6)								Baik	

Dari tabel matriks Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Kecamatan Samarinda Seberang yang tersaji di atas, dapat diketahui beberapa hal, yaitu total Capaian Penilaian Kinerja (PK) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 sebesar 90,04 %. dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 juga sama dengan total capaian penilaian kinerja, yaitu sebesar 90,04 %. Adapun Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 adalah Baik.

**BAB IV
PENUTUP**

Berdasarkan Peraturan Presiden (PP) RI Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB) Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Samarinda Seberang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian yang sekarang berubah menjadi Laporan Kinerja (LKj) dan Penetapan Kinerja menjadi Perjanjian Kinerja serta ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Wakil Walikota Samarinda Nomor : 061/0485/Org.3/IX/2014 tanggal 6 September 2014 tentang mekanisme pengumpulan Data Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Samarinda. Oleh karenanya Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang lalu.

Beberapa hal penting yang ada di dalam LKjIP Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 ini, di antaranya :

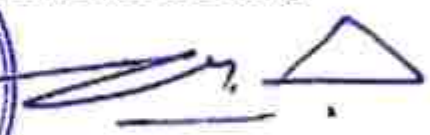
- 1) Pada Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Kecamatan Samarinda seberang terbagi menjadi 2 (dua) Perjanjian Kinerja, yang mana Perjanjian Kinerja Murni 2025 masih merujuk kepada indikator lama yang berpedoman pada Renstra Kecamatan Samarinda seberang Periode 2021-2026, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 sudah merujuk kepada indikator baru yang sudah berpedoman pula pada Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025- 2029.
- 2) Capaian Kinerja Kecamatan Samarinda Seberang pada tahun 2025 sebesar 105,93% yang memiliki makna sangat Tinggi. Capaian IPP Kecamatan Samarinda Seberang Melebihi dari target yang di tentukan. Semoga bisa terus di pertahankan dan di tingkatkan Nilai IPP Tahun berikutnya.

- 3) Untuk Penilaian Kinerja Organisasi (PKO), total Capaian Penilaian Kinerja (PK) Kecamatan Samarinda seberang Tahun 2025 sebesar 90,04% dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 juga sama dengan total capaian penilaian kinerja, yaitu sebesar 90,04%. Adapun Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Kecamatan Samarinda seberang Tahun 2025 adalah Baik.
- 4) Total anggaran Kecamatan Samarinda seberang pada tahun 2025, baik untuk Belanja Operasi (Belanja Pegawai & Belanja Barang Jasa) maupun Belanja Modal berjumlah sebesar **Rp 32.530.791.117,00** (Tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah), dimana terealisasi sebesar **Rp 31.501.505.984,00** (Tiga puluh satu miliar lima ratus satu juta lima ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan persentase realisasi pada angka 96,84% (Sembilan Puluh Enam Koma Delapan Puluh empat Persen).
- 5) Masih adanya Efisiensi anggaran belanja Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.029.285.133,- atau 3,16 %.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini dibuat, semoga bermanfaat bagi perencanaan pembangunan yang akan datang, khususnya di Kecamatan Samarinda Seberang. Kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan kegiatan ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan



Samarinda, 09 Februari 2026
Camat Samarinda Seberang


ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP, M.A.P
Revisi TK.I (IV/b)
NIP. 19860723 200412 1 003

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kesuma Bangsa No.82, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75121

Laman <https://samarindakota.go.id>

Pos-el info@samarindakota.go.id

LEMBAR ASISTENSI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Kecamatan Samarinda Seberang

Tanggal Asistensi : 23 April 2026

No	Kriteria	Catatan
Laporan Kinerja		
1	Kesesuaian Sistematika pelaporan dengan Permenpan 53 Tahun 2014	<u>OK</u>
2	Memuat seluruh informasi capaian kinerja pada Perangkat Daerah pada setiap level kinerja	- mentantumkan Capaian Kinerja kegiatan dan sub. kegiatan
3	Terdapat narasi pencapaian kinerja yang memuat: 1. Analisa pencapaian kinerja <input checked="" type="checkbox"/> 2. Perbandingan capaian kinerja dengan: a. Capaian beberapa tahun sebelumnya <input type="checkbox"/> b. Capaian Tingkat Kab/Kota <input checked="" type="checkbox"/> c. Capaian Nasional <input type="checkbox"/> d. Target kinerja pada tahun akhir dokumen perencanaan <input type="checkbox"/> 3. Faktor pendukung & penghambat <input checked="" type="checkbox"/> 4. Solusi & strategi pencapaian kinerja <input checked="" type="checkbox"/>	 → ditambahkan tabel Pelayanan publik 2023 - 2025 → ditambahkan tabel Sesuai Renstra baru. → dimasukkan IPP → Analisis, fokus terhadap analisis sesuai dengan Renstra terbaru
Lain-Lain		
4	Kelengkapan dokumen yang diunggah di eSR Menpan	<u>OK</u>
5	Kesesuaian Rencana Aksi yang disusun per triwulan	Revisi di rumah / di pertogam

Diasistensi Oleh,

M. Rizka Nugraha
NIP. 199304222015031001

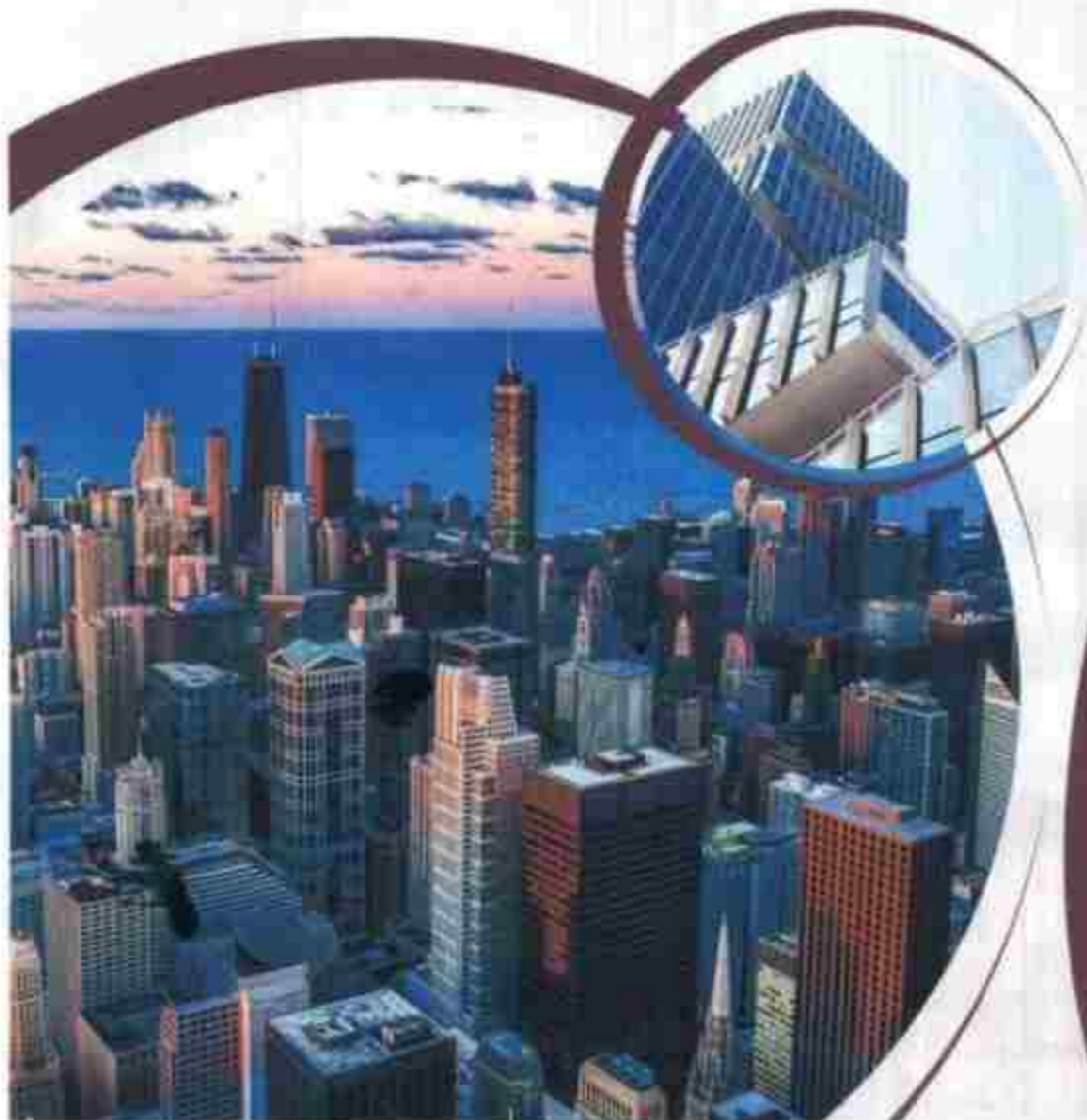
Perangkat Daerah

M. Ali
NIP. 197305232007011012



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang@75samarinda.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP

Jabatan : Camat Samarinda Seberang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDI HARUN

Jabatan : Walikota Samarinda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Kedua,

ANDI HARUN

Pihak Pertama,

ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
SAMARINDA 607232004121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	4,05

Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran :

- Rp. 15.443.104.254,00
- Rp. 1.549.732.748,00
- Rp. 73.162.000,00

Pihak Kedua,

ANDI HARUN

Pihak Pertama,

MELISA KOESPRAYOGI, S.STP
 86607232004121003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSU ALAM, S.IP, M.SI

Jabatan : Sekretaris Camat Samarinda Seberang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP

Jabatan : Camat Samarinda Seberang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025



Pihak Kedua,

ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 198607232004121003

Pihak Pertama,

SYAMSU ALAM, S.IP, M.SI
NIP. 197807072006041009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS CAMAT
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,30
		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	72,75
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan	%	91,05

Program :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran :

Rp. 15.443.104.254,00

Rp. 1.549.732.748,00

Pihak Kedua,



WIDIA KRESPRAYOGI, S.STP
 NIP. 198007232004121003

Pihak Pertama,

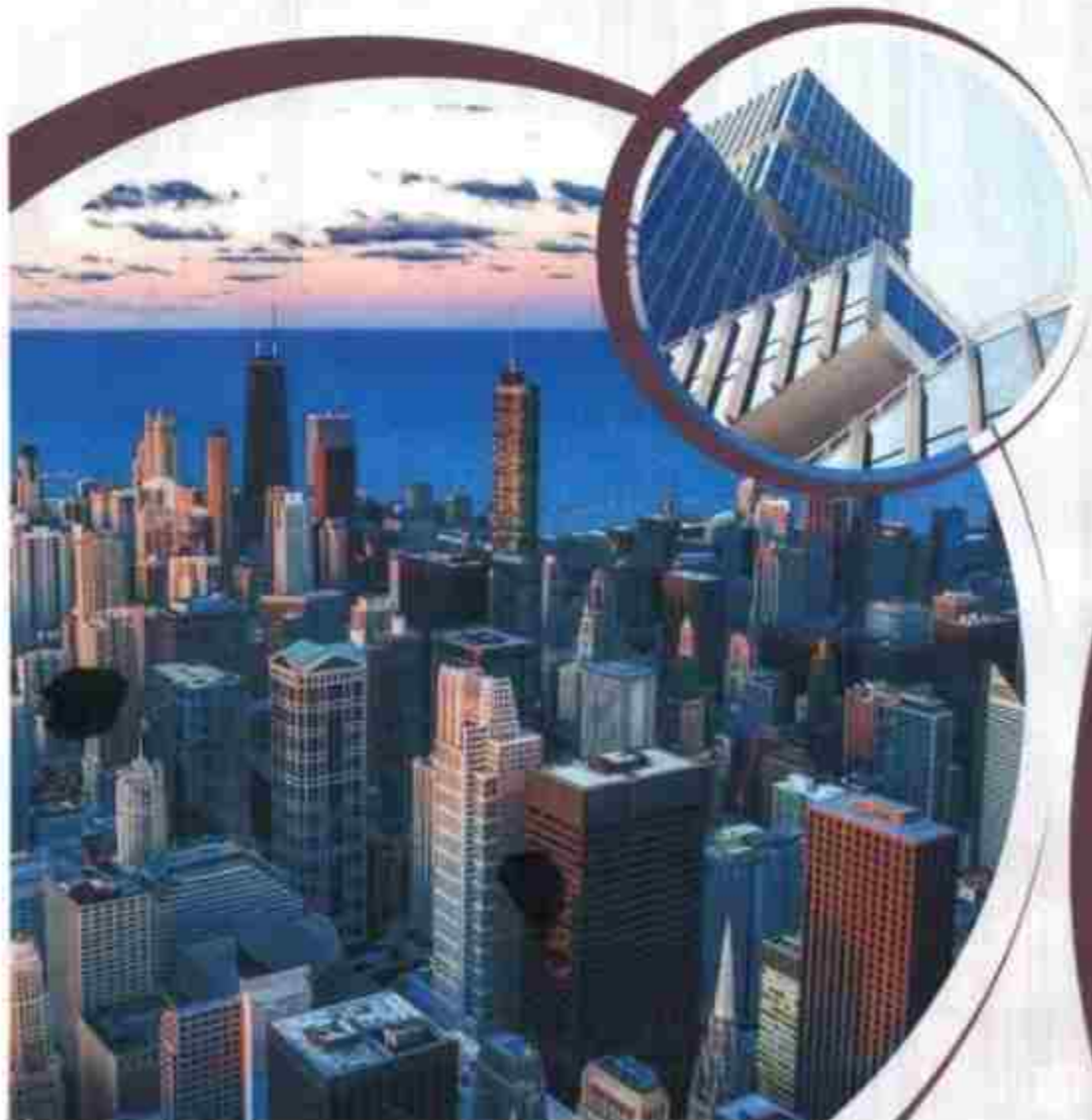


SYAMSU ALAM, S.IP, M.SI
 NIP. 197807072006041009



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KASI & KABAG KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang27@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUDI HARTONO, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
Jabatan : Camat Samarinda Seberang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

 Pihak Kedua,

ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 807232004121003

Pihak Pertama,

RUDI HARTONO, S.Sos
NIP. 197006061993081002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran :

Rp. 1.549.732.748,00



Pihak Pertama,



RUDI HARTONO, S.Sos
NIP. 197006061993081002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NANANG MUHAMAD NUR, SH

Jabatan : Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP

Jabatan : Camat Samarinda Seberang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Pertama

NANANG MUHAMAD NUR, SH
NIP. 197307212009011004



Pihak Kedua,

ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 198507232004121003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14
2.	Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	141

- | | |
|---|----------------------|
| Kegiatan : | Anggaran : |
| 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rp. 1.549.732.748,00 |
| 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Rp. 10.818.000,00 |

Pihak Kedua,




ABITYA KOESPRAYOGI, S.STP
 NIP. 198607232004121003

Pihak Pertama



NANANG MUHAMAD NUR, SH
 NIP. 197307212009011004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang27@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENDRA ISTIYANTO, S.T

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP

Jabatan : Camat Samarinda Seberang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Kedua,

ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 198607232004121003

Pihak Pertama,

HENDRA ISTIYANTO, ST
NIP. 198910282015031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran :


Rp. 1.549.732.748,00

Kedua,



AGUS PRAYOGI, S.STP
NIP. 195607232004121003

Pihak Pertama,



HENDRA ISTIYANTO, ST
NIP. 198910282015031003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 280459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FRANSISKA BUDIARTI, SE

Jabatan : Kepala Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP

Jabatan : Camat Samarinda Seberang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Pertama,

FRANSISKA BUDIARTI, SE
NIP. 197705292007012018



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran :

Rp. 1.549.732.748,00



Pihak Pertama,

FRANSISKA BUDIARTI, SE
NIP. 197705292007012018



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang07@gmail.com - Website : <http://koc.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUSLIANI EKAYANTI, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
Jabatan : Camat Samarinda Seberang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Kedua,

ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 19607232004121003

Pihak Pertama,

YUSLIANI EKAYANTI, S.Sos
NIP. 196905311991032006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI KESEJAHTERAAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Sasaran (3)	Satuan (4)	Target (5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14
2.	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	24

Kegiatan

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat kecamatan dan Kelurahan

Anggaran

- Rp. 1.549.732.748,00
- Rp. 62.344.000,00

Kedua,



MULYA KOESPRAYOGI, S.STP
 NIP. 198507232004121003

Pertama,



YUSLIANI EKAYANTI, S.Sos
 NIP. 196905311991032006



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURMIYATI, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SYAMSU ALAM, S.IP, M.SI

Jabatan : Sekretaris Camat Samarinda Seberang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Kedua,

SYAMSU ALAM, S.IP, M.SI
NIP. 197807072006041009

Pihak Pertama,

NURMIYATI, SE
NIP. 197607202002122004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	%	95,50
2	Meningkatnya Pemenuhan Barang Milik Daerah Yang Menunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	97,25
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Di Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP	%	98,15
4	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Yang Menunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	%	97,50
5	Meningkatnya Kualitas Dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14

Kegiatan :

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran :

- Rp. 614.935.300,00
- Rp. 1.037.324.500,00
- Rp. 516.184.130,00
- Rp. 644.582.000,00
- Rp. 1.549.732.748,00

Pihak Kedua,


SYAMSU ALAM, S.I.P. M.SI
 NIP. 197807072006041009

Pihak Pertama,


NURMIYATI, SE
 NIP. 197607202002122004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang@kotamak.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMMAD SOLIH, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SYAMSU ALAM, S.IP, M.SI

Jabatan : Sekretaris Camat Samarinda Seberang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Kedua

SYAMSU ALAM, S.IP, M.SI
NIP. 197807072006041009

Pihak Pertama,

MOHAMMAD SOLIH, SE
NIP. 197305232007011012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Sasaran (3)	Satuan (4)	Target (5)
1.	Meningkatnya Kualitas Dan Ketepatan Waktu Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai SOP	%	95,50
2.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pelaksanaan Administarsi Keuangan Derangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Dan Dilaporkan Secara Tepat Waktu	%	95,50
3.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14

Kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran :

Rp. 200.418.200,00
Rp 12.429.660.124,00
Rp. 1.549.732.748,00

Pihak Kedua


SYAMSU ALAM, S.IP, M.SI
NIP. 197807072006041009

Pihak Pertama,

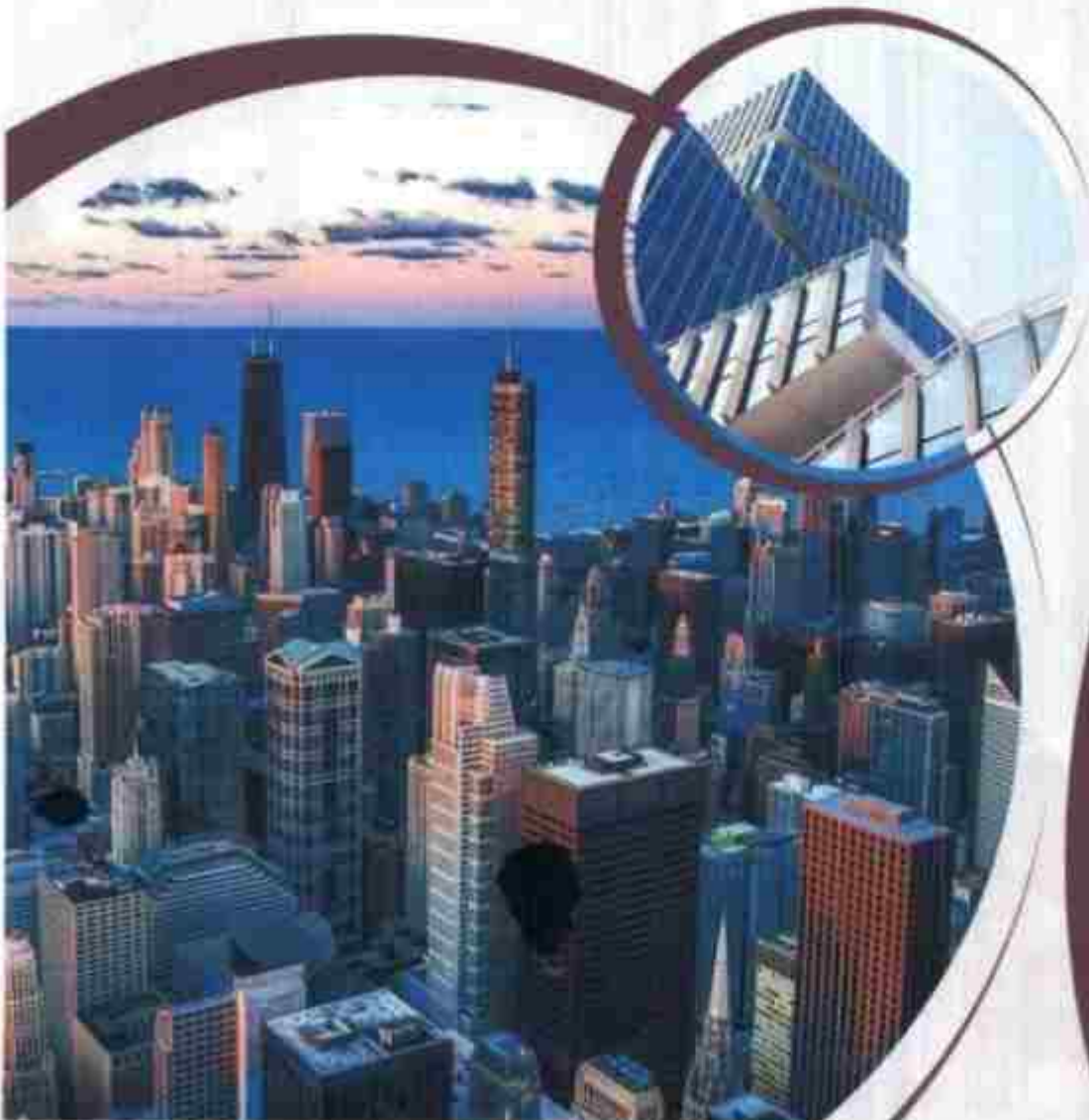

MOHAMMAD SOLIH, SE
NIP. 197305232007011012



2025

**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

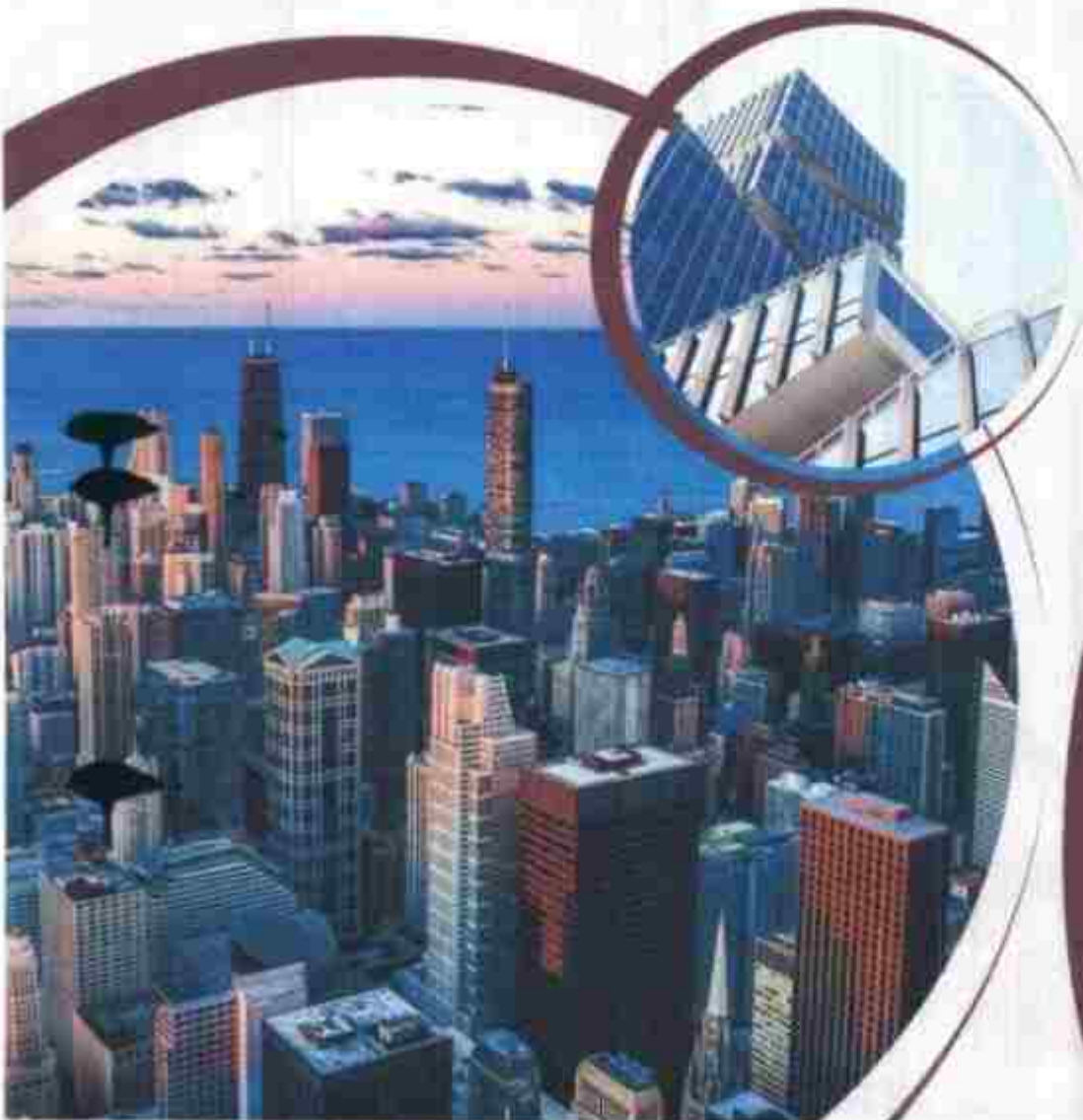
**KELURAHAN
SAMARINDA SEBERANG**





PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KELURAHAN BAQA SAMARINDA SEBERANG





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail: camarindaseberang@samara.go.id - Website : <https://ec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOOR DINY ELДАРINA, S.I.P

Jabatan : Lurah Baqa

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP

Jabatan : Camat Samarinda Seberang


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 198607232004121003

Samarinda, 10 November 2025
Pihak Pertama

NOOR DINY ELДАРINA, S.I.P
NIP. 197002011992032008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LURAH BAQA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	%	95,00
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan	%	91,05

Program :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran :

Rp. 2.607.328.500,00
Rp. 362.824.750,00





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAISAL RAHMAN, SE
Jabatan : Sekretaris Kelurahan Baqa

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : NOOR DINY EL DARINA, S.I.P
Jabatan : Lurah Baqa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

NOOR DINY EL DARINA, S.I.P
NIP. 197009011992032008

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Pertama,

FAISAL RAHMAN, SE
NIP. 198211222009011002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Sasaran (3)	Satuan (4)	Target (5)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Baqa	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Kegiatan	141
2.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Baqa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	24
3.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14

Kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
3. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran :

- Rp 2.566.385.500,00
- Rp 40.943.000,00
- Rp 362.824.750,00



Pihak Kedua,

NOOR DINY ELDARINA, S.I.P
NIP. 197002811992032008

Pihak Pertama,

FAISAL RAHMAN, SE
NIP. 198211222009011002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail: pemerintahseberang07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAHRINI, SE

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : NOOR DINY EL DARINA, S.I.P

Jabatan : Lurah Baqa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

NOOR DINY EL DARINA, S.I.P
NIP. 197002011992032008

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Pertama,

SYAHRINI, SE
NIP. 197011151992031008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14

- Kegiatan :**
1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran :
 Rp 362.824.750,00



 Pihak Kedua,

NOOR DINY EL DARINA, S.I.P
 NIP. 197002011992032008

Pihak Pertama,

SYAHRAINI, SE
 NIP. 197011151992031008



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURUL MUSTAQURIA, S.Ag
Jabatan : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : NOOR DINY ELДАРINA, S.I.P
Jabatan : Lurah Baqa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

NOOR DINY ELДАРINA, S.I.P
NIP. 197002011992032008

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Pertama,

NURUL MUSTAQURIA, S.Ag
NIP. 197607262010012012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14
2	Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	141

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran :

Rp 362.824.750,00
Rp 2.566.385.500,00



Pihak Kedua,

NOOR DINY EL DARINA, S.I.P
NIP. 197002011992032008

Pihak Pertama,

NURUL MUSTAQURIA, S.Ag
NIP. 197607262010012012



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail: pejabat@kabesamarindoseberang07@gmail.com - Website: <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDAH FITRIANTI H.M, SE
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NOOR DINY EL DARINA, S.I.P
Jabatan : Lurah Baqa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

NOOR DINY EL DARINA, S.I.P
NIP. 197002011992032008

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Pertama,

INDAH FITRIANTI H.M, SE
NIP. 197508152007012019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI KESEJAHTERAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Sasaran (3)	Satuan (4)	Target (5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14
2.	Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	141
3.	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	24

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat kecamatan dan Kelurahan

Anggaran :

Rp. 362.824.750,00
Rp. 2.566.385.500,00
Rp. 40.943.000,00



Pihak Kedua,

NOOR DINY ELDARINA, S.I.P
NIP. 197002811992032008

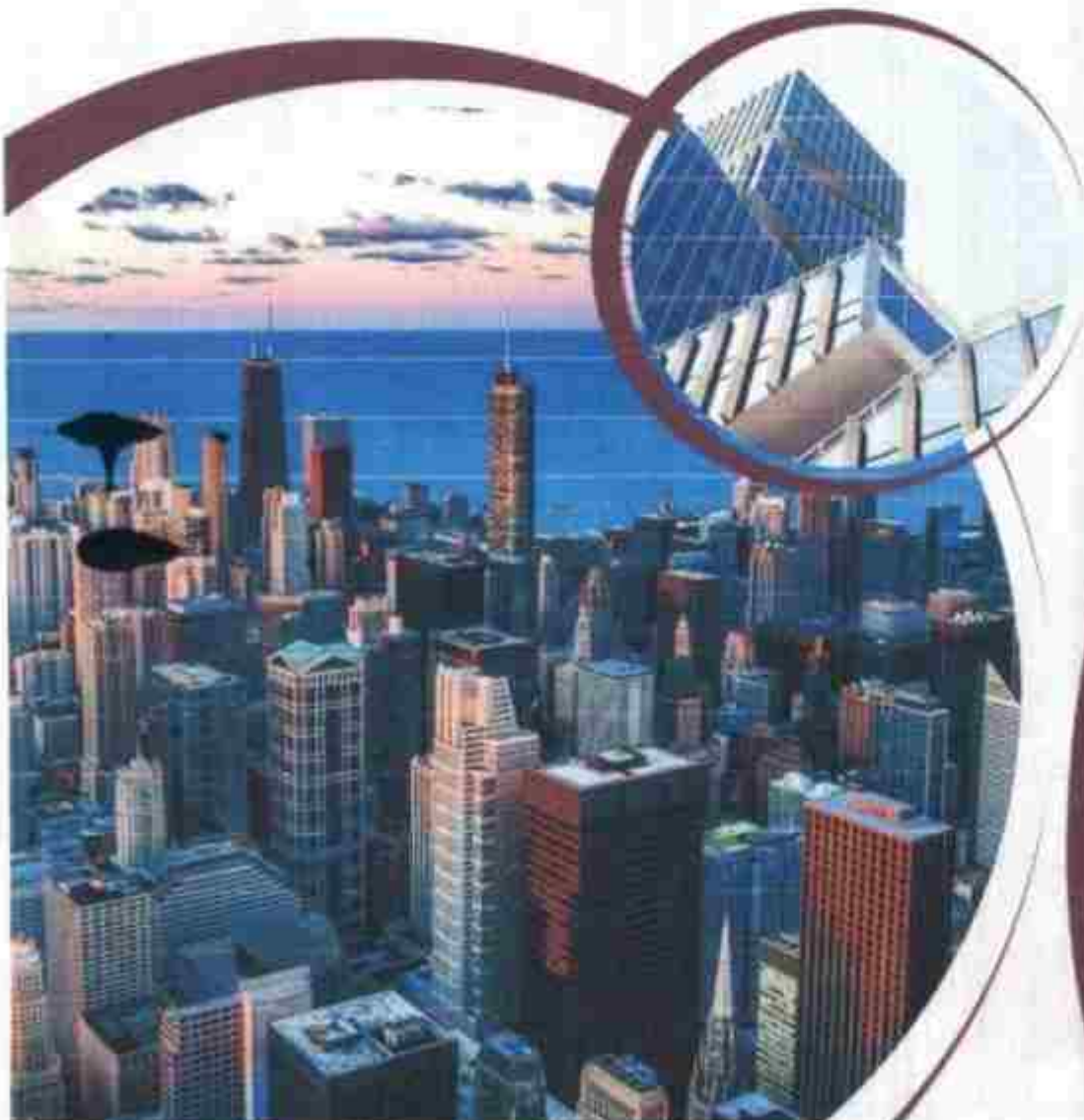
Pihak Pertama,

INDAH FITRIANTI H.M, SE
NIP. 197508152007012019



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KELURAHAN SUNGAI KELEDANG SAMARINDA SEBERANG





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintah@samara.go.id - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMADI, SP
Jabatan : Lurah Sungai Keledang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
Jabatan : Camat Samarinda Seberang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Kedua,

ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 198607232004121003

Pihak Pertama

RAHMADI, SP
NIP. 198201312005021004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LURAH SUNGAI KELEDANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Sasaran (3)	Satuan (4)	Target (5)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	%	95,00
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan	%	91,05

Program :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran :

Rp 4.193.005.443,00
Rp 163.545.750,00

Kedua,

ALMYA KOESPRAYOGI, S.STP
 NIP. 198807232004121003

Pertama,

RAHMADI, SP
 NIP. 198208312005021004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail kecamatanseberang07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDI SAHJAYA, S.P

Jabatan : Sekretaris Kelurahan Sungai Keledang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RAHMADI, S.P

Jabatan : Lurah Sungai Keledang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Kedua,

RAHMADI, S.P
NIP. 198208312005021004

Pihak Pertama,

BUDI SAHJAYA, S.P
NIP. 196904142001121004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Sasaran (3)	Satuan (4)	Target (5)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sungai Keledang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Kegiatan	141
2.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sungai Keledang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	24
3.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14

Kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
3. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran :

- Rp 4.153.850.193,00
Rp 39.155.250,00
Rp 163.545.750,00

Pihak Kedua,

 **RAHMADI, S.P**
NIP. 198208312005021004

Pihak Pertama,


BUDI SAHJAYA, S.P
NIP. 196904142001121004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang77@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZKIAN AMALSYAH PUTERA, M.A.P, S.STP
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RAHMADI, SP
Jabatan : Lurah Sungai Keledang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

RAHMADI, SP
NIP. 198208312005021004



RIZKIAN AMALSYAH PUTERA, M.A.P, S.STP
NIP. 199312102015071005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran :

Rp 163.545.750,00



Pihak Pertama,



RIZKIAN AMALSYAH PUTERA, M.A.P, S.STP
NIP. 199312102015071005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahkota02@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HATTA MUSTAFA ARIFIN, A.Md
Jabatan : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RAHMADI, SP
Jabatan : Lurah Sungai Keledang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Pertama,

HATTA MUSTAFA ARIFIN, A.Md
NIP. 198003312009011003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14
2	Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	141

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran :

Rp 163.545.750,00
Rp 4.153.850.193,00



Pihak Kedua,

RAHMADI, SP

NIP. 198208312005021004

Pihak Pertama,

HATTA MUSTAFA ARIFIN, A.Md

NIP. 198003312009011003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintah@pemerintah07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAYANA, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RAHMADI, SP
Jabatan : Lurah Sungai Keledang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Pertama,

HAYANA, S.Sos

NIP. 197603111998032005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI KESEJAHTERAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Sasaran (3)	Satuan (4)	Target (5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14
2.	Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	141
3.	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	24

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat kecamatan dan Kelurahan

Anggaran :

Rp. 163.545.750,00
Rp. 4.153.850.193,00
Rp. 39.155.250,00



Kedua,

Pihak Pertama,

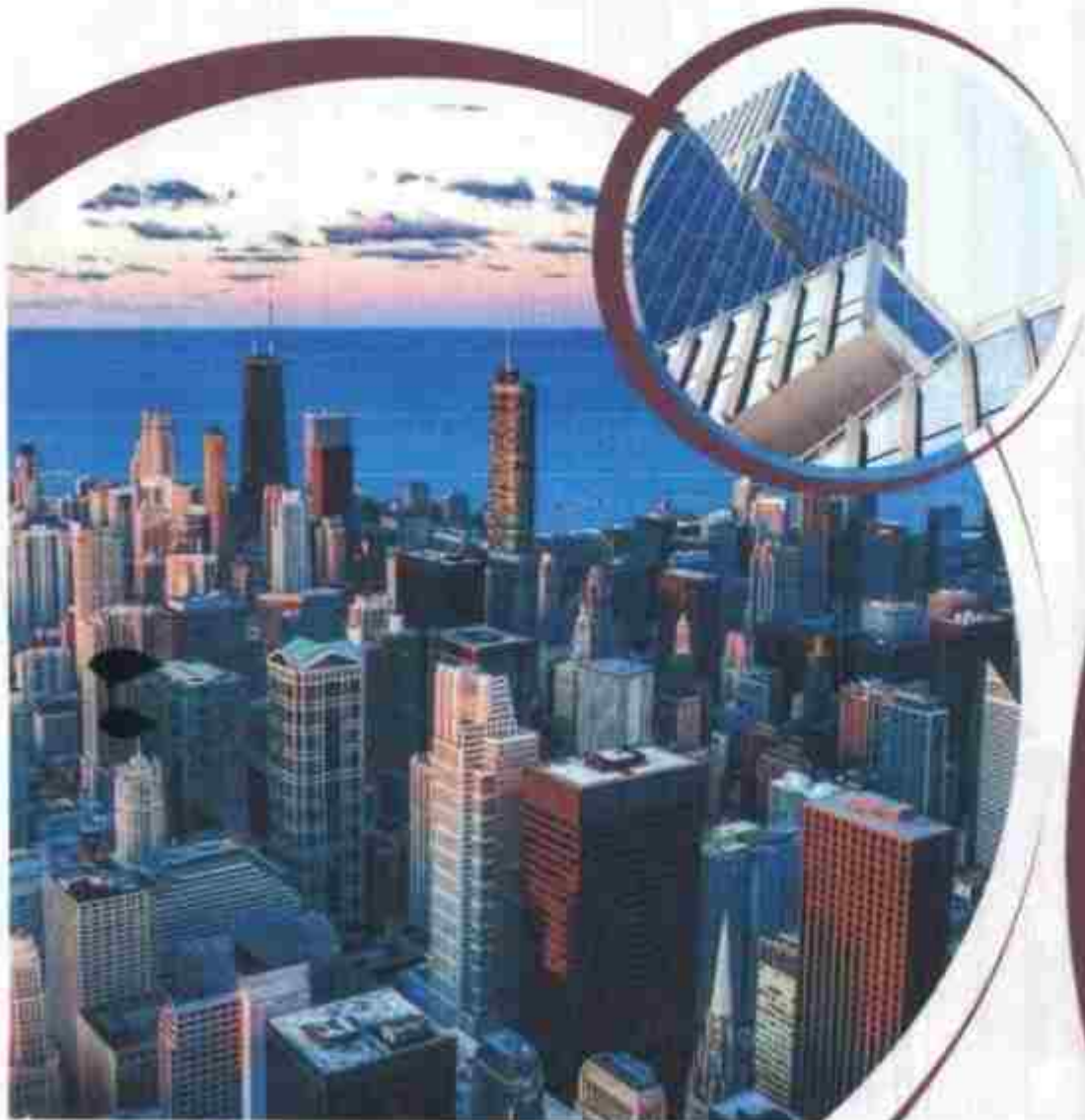
HAYANA, S.Sos

NIP. 197603111998032005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KELURAHAN MESJID SAMARINDA SEBERANG





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang@77@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURLINA

Jabatan : Lurah Mesjid

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP

Jabatan : Camat Samarinda Seberang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Kedua,

ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 196707232004121003

Pihak Pertama,

NURLINA
NIP. 196711261989022001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LURAH MESJID
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Sasaran (3)	Satuan (4)	Target (5)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	%	95,00
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	%	91,05
3.	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	24

Program/Kegiatan :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran :

Rp. 2.496.579.386,00
Rp 158.550.000,00
Rp 42.420.500,00

Pihak Kedua,



DPHYA KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 198007232004121003

Pihak Pertama,



NUR LINA
NIP. 196711261989022001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRMA ARIANI, A.MD
Jabatan : Sekretaris Kelurahan Mesjid

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : NURLINA
Jabatan : Lurah Mesjid

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Kedua,

NURLINA
NIP. 198711261989022001

Pihak Pertama,

IRMA ARIANI, A.MD
NIP. 197311231994022001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Sasaran (3)	Satuan (4)	Target (5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kelepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran :

Rp -


 Pihak Kedua,

NURLINA
 NIP. 196711281989022001

Pihak Pertama,

IRMA ARIANI, A.MD
 NIP. 197311231994022001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang07@gmail.com - Website : <http://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TOTO LUSIANTO, SE

Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : NURLINA

Jabatan : Lurah Masjid

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Kedua,

NURLINA
NIP. 198711261989022001

Pihak Pertama,

TOTO LUSIANTO, SE
NIP. 197711282007011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI KESEJAHTERAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No (1)	Sasaran Sub Kegiatan (2)	Indikator Sasaran (3)	Satuan (4)	Target (5)
1.	Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2
2.	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	24

Sub Kegiatan :

1. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran :

Rp. 931.358.886,00
Rp. 42.420.500,00



Pihak Pertama,

TOTO LUSIANTO, SE
NIP. 197711282007011006



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAKA DILAGA, SH

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : NURLINA

Jabatan : Lurah Mesjid

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Pertama,

JAKA DILAGA, SH

NIP. 198101272007011008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran :

Rp. 158.550.000,00

Pihak Kedua,

NURLINA
 NIP. 196711261989022001

Pihak Pertama,

JAKA DILAGA, SH
 NIP. 198101272007011008



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BADRI, SE**
Jabatan : **Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NURLINA**
Jabatan : **Lurah Mesjid**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025



Pihak Pertama,

BADRI, SE
NIP. 197510102010011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No (1)	Sasaran Sub Kegiatan (2)	Indikator Sasaran (3)	Satuan (4)	Target (5)
1.	Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	21

Sub Kegiatan :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Anggaran :

Rp 1.522.800.000,00



Pihak Pertama,



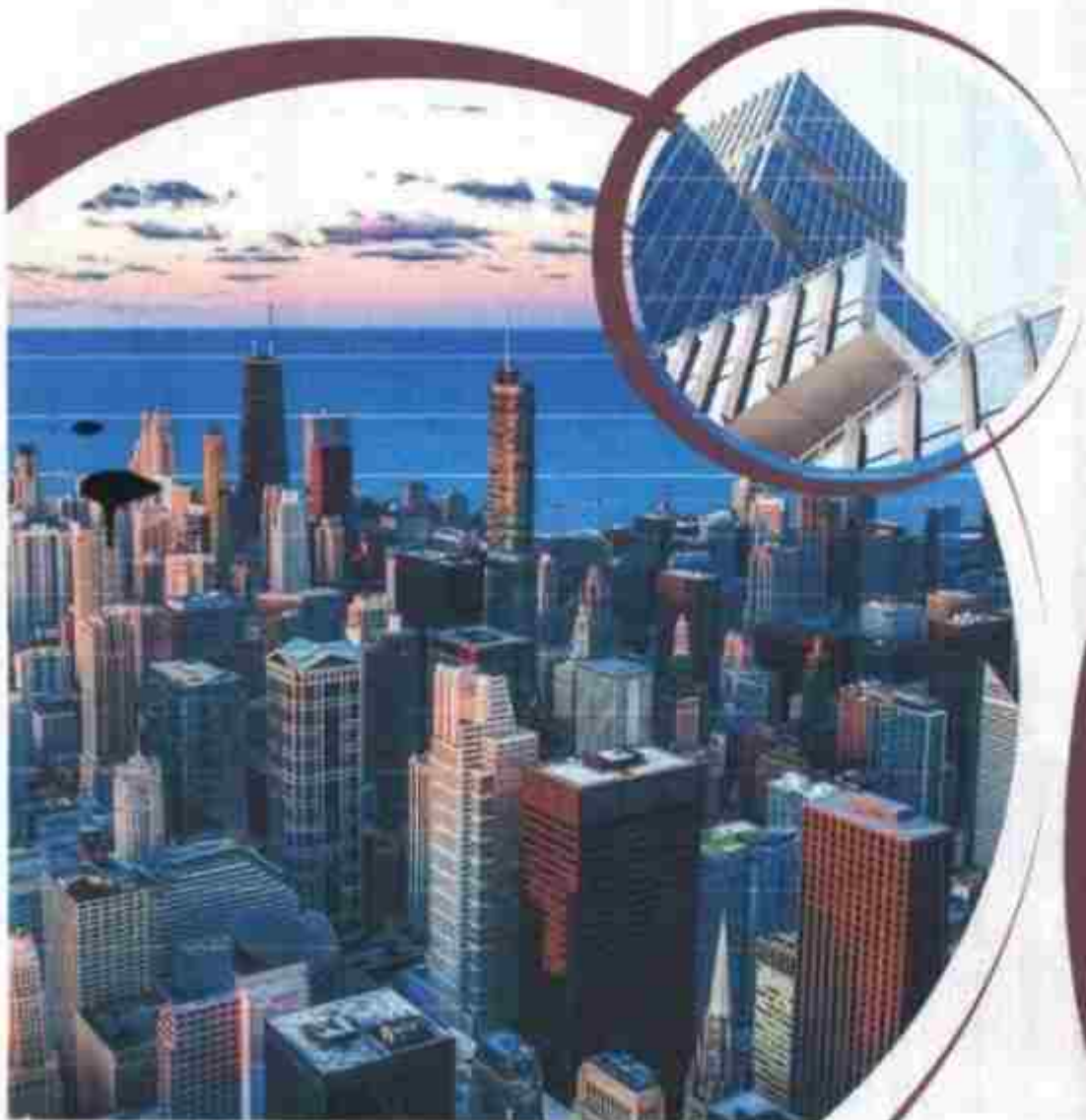
BADRI, SE
NIP. 197510102010011003



2025

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KELURAHAN MANGKUPALAS SAMARINDA SEBERANG





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang27@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALFIAN NOOR, SE
Jabatan : Lurah Mangkupalas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
Jabatan : Camat Samarinda Seberang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Kedua,

ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 80607232004121003

Pihak Pertama

ALFIAN NOOR, SE
NIP. 87512092008011004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LURAH MANGKUPALAS
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	%	95,00
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan	%	91,05

Program :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran :

Rp 2.273.888.694,00
Rp 162.800.000,00





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI PUJI RAHAYU, SH
Jabatan : Sekretaris Kelurahan Mangkupalas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ALFIAN NOOR, SE
Jabatan : Lurah Mangkupalas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Pertama,

SRI PUJI RAHAYU, SH
NIP. 197006252009012001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Mangkupalas	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Kegiatan	141
2.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Mangkupalas	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	24
3.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14

Kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
3. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran :

Rp 2.229.586.494,00
Rp 44.302.200,00
Rp 162.800.000,00



Pihak Pertama,

SRI PUJI RAHAYU, SH
NIP. 197006252009012001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang2@gmail.com - Website : <http://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARDIANSYAH, SE

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ALFIAN NOOR, SE

Jabatan : Lurah Mangkupalas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025



Pihak Pertama,

ARDIANSYAH, SE
NIP. 197703042007011012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran :

Rp 162.800.000,00



Pihak Pertama,

ARDIANSYAH, SE
 NIP. 197703042007011012



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD DEDDY ISKANDARSYAH MUDA, SE
Jabatan : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ALFIAN NOOR, SE
Jabatan : Lurah Mangkupalas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Samarinda, 10 November 2025

Pihak Pertama,

AHMAD DEDDY ISKANDARSYAH MUDA, SE
NIP. 197807082010011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14
2.	Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	141

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran :

Rp 162.800.000,00
Rp 2.229.586.494,00



Pihak Pertama,

(Signature)
AHMAD DEDDY ISKANDARSYAH MUDA, SE
NIP. 197807082010011001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail peramotib@seberang07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NIKEN SULASTRI, A.Md**

Jabatan : **Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ALFIAN NOOR, SE**

Jabatan : **Lurah Mangkupalas**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Samarinda, 10 November 2025

Pihak Pertama,

NIKEN SULASTRI, A.Md
NIP. 198108102010012017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI KESEJAHTERAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14
2.	Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	141
3.	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	24

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat kecamatan dan Kelurahan

Anggaran :

- Rp. 162.800.000,00
- Rp. 2.229.586.494,00
- Rp. 44.302.200,00



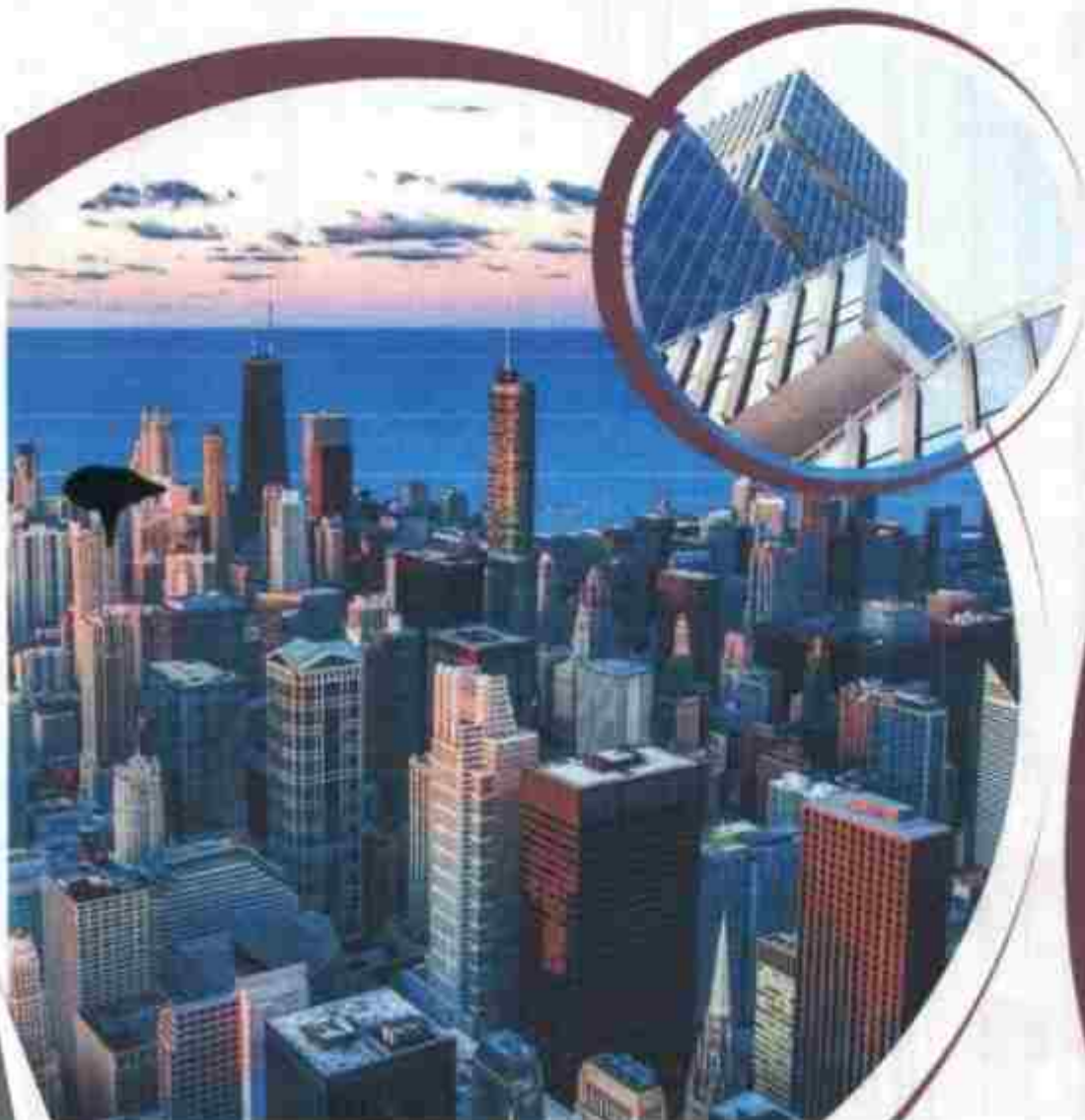
Pihak Pertama,

NIKEN SULASTRI, A.Md
 NIP. 198108102010012017



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**KELURAHAN GUNUNG PANJANG
SAMARINDA SEBERANG**





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang127@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LAILY HIDAYATI, SH, M.Si

Jabatan : Lurah Gunung Panjang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP

Jabatan : Camat Samarinda Seberang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Kedua,


ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 196607232004121003

Pihak Pertama


LAILY HIDAYATI, SH, M.Si
NIP. 198207012009032005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LURAH GUNUNG PANJANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Sasaran (3)	Satuan (4)	Target (5)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	%	95,00
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan	%	91,05

Program :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran :

Rp 1.080.870.384,00

Rp 163.172.000,00

Kedua,



ADHYA RORO PRAYOGI, S.STP
NIP. 07232004121003

Pihak Pertama



LAILY HIDAYATI, SH, M.Si
NIP. 198207012009032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintabsiberang27@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RATNANINGSIH, SE, M.SI

Jabatan : Sekretaris Kelurahan Gunung Panjang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : LAILY HIDAYATI, SH, M.SI

Jabatan : Lurah Gunung Panjang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Kedua,


LAILY HIDAYATI, SH, M.SI
NIP. 198207012009032005

Pihak Pertama,


RATNANINGSIH, SE, M.SI
NIP. 196911102008012042

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Gunung Panjang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Kegiatan	141
2.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Gunung Panjang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	24
3.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14

Kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
3. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran :

Rp 1.030.870.384,00
Rp 50.000.000,00
Rp 163.172.000,00

Pihak Kedua,



LAILY HIDAYATI, SH, M.SI
NIP. 198207012009032005

Pihak Pertama,



RATNANINGSIH, SE, M.SI
NIP. 196911102008012042



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang17@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MIRA SARI INDAH WIRASWASTA, SE
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : LAILY HIDAYATI, SH, M.SI
Jabatan : Lurah Gunung Panjang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Kedua,

LAILY HIDAYATI, SH, M.SI
NIP. 198207012009032005

Pihak Pertama,

MIRA SARI INDAH WIRASWASTA, SE
NIP. 198102252012122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran :

Rp. 163.172.000,00

Pihak Kedua,



LAILY HIDAYATI, SH, M.SI
 NIP. 198207012009032005

Pihak Pertama,



MIRA SARI INDAH WIRASWASTA, SE
 NIP. 198102252012122001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAISAL ANWAR, SE

Jabatan : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : LAILY HIDAYATI, SH, M.SI

Jabatan : Lurah Gunung Panjang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025


Pihak Kedua,

LAILY HIDAYATI, SH, M.SI
NIP. 198207012009032005

Pihak Pertama,

FAISAL ANWAR, SE
NIP. 197708282007011014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14
2	Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	141

Kegiatan :


1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran :

Rp 163.172.000,00
Rp 1.030.870.384,00

Pihak Kedua,

LAILY HIDAYATI, SH, M.SI
NIP. 198207012009032005

Pihak Pertama,

FAISAL ANWAR, SE
NIP. 197708282007011014



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemecitasabersara7@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERLINAWATI, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **LAILY HIDAYATI, SH, M.Si**

Jabatan : **Lurah Gunung Panjang**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Kedua,

LAILY HIDAYATI, SH, M.Si
NIP. 198207012009032005

Pihak Pertama,

HERLINAWATI, S.Sos
NIP. 197704262008012017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI KESEJAHTERAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Sasaran (3)	Satuan (4)	Target (5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14
2.	Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	141
3.	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	24

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat kecamatan dan Kelurahan

Anggaran :

Rp. 163.172.000,00
Rp. 1.030.870.384,00
Rp. 50.000.000,00

Pihak Kedua,

LAILY HIDAYATI, SH, M.Si
NIP. 198207012009032005

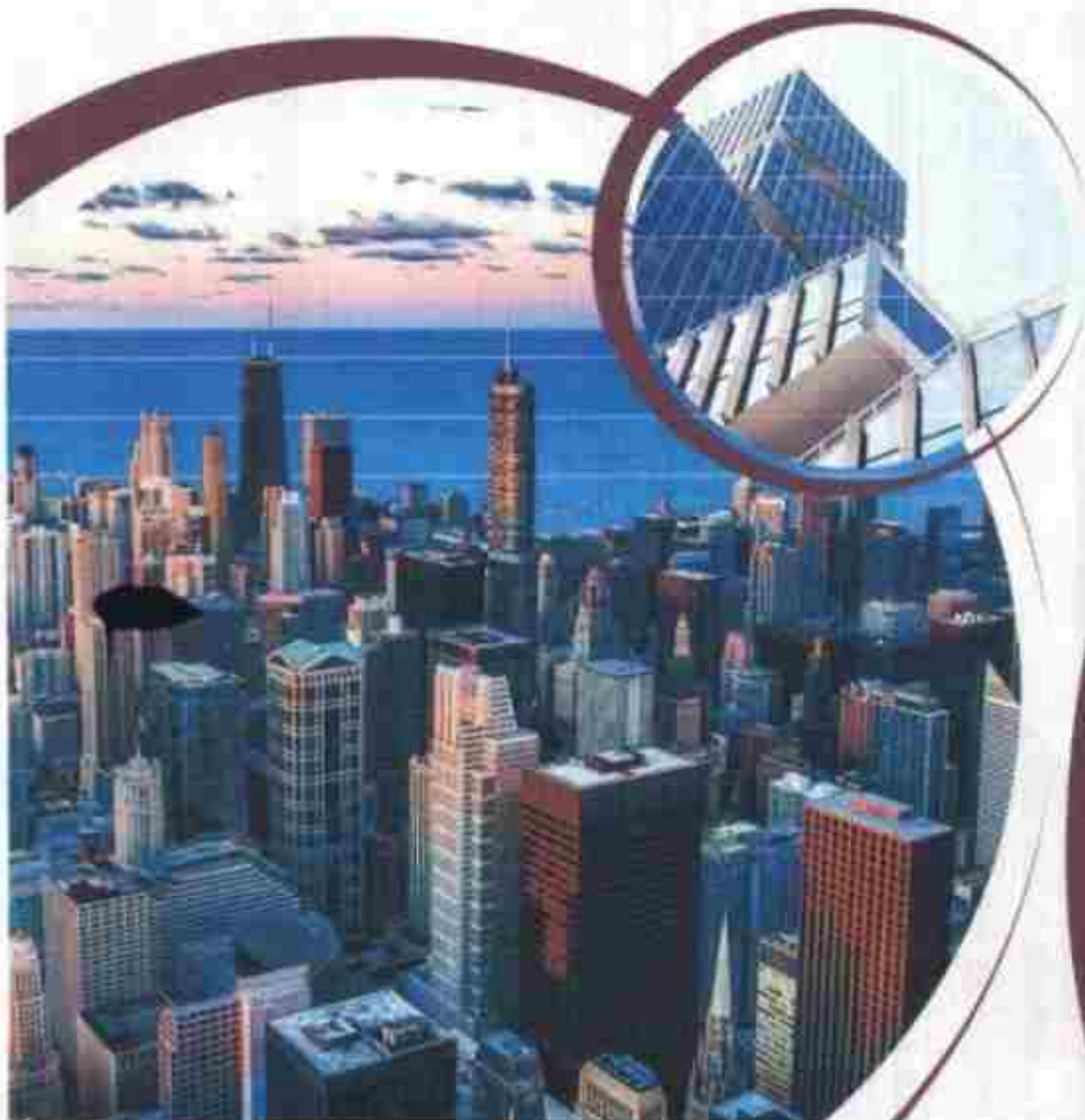
Pihak Pertama,

HERLINAWATI, S.Sos
NIP. 197704262008012017



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**KELURAHAN TENUN SAMARINDA
SAMARINDA SEBERANG**





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang07@gmail.com - Website : <http://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LISA RIZKY WARDANI, S.IP., M.M

Jabatan : Lurah Tenun Samarinda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP

Jabatan : Camat Samarinda Seberang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Kedua,

ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 197232004121003

Pihak Pertama

LISA RIZKY WARDANI, S.IP., M.M
NIP. 199107152010102001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LURAH TENUN SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	%	95,00
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan	%	91,05

Program :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran :

Rp 1.638.805.208,00
Rp 163.422.000,00





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PAHLEVI, SE

Jabatan : Sekretaris Kelurahan Tenun Samarinda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : LISA RIZKY WARDANI, S.IP., M.M

Jabatan : Lurah Tenun Samarinda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
LISA RIZKY WARDANI, S.IP., M.M
NIP. 199107152010102001

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Pertama,


PAHLEVI, SE
NIP. 197502142008011019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sungai Keledang	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Kegiatan	141
2.	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sungai Keledang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	24
3.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14

Kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
3. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran :

Rp 1.598.132.208,00
Rp 40.673.000,00
Rp 163.422.000,00

Pihak Kedua,

LISA RIZKY WARDANI, S.IP., M.M
NIP. 199107152010102001

Pihak Pertama,

PAHLEVI, SE
NIP. 197502142008011019



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp. (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ISNAINI, SE
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : LISA RIZKY WARDANI, S.IP., M.M
Jabatan : Lurah Tenun Samarinda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

LISA RIZKY WARDANI, S.IP., M.M
NIP. 199107152010102001

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Pertama,

MUHAMMAD ISNAINI, SE
NIP. 197402042002121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran :

Rp 163.422.000,00

Pihak Kedua,



LISA RIZKY WARDANI, S.IP., M.M
 NIP. 199107152010102001

Pihak Pertama,



MUHAMMAD ISNAINI, SE
 NIP. 197402042002121002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pejabatkecamatan07@gmail.com - Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RATNIASIH, SE**

Jabatan : **Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **LISA RIZKY WARDANI, S.IP., M.M**

Jabatan : **Lurah Tenun Samarinda**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025



Pihak Kedua,

LISA RIZKY WARDANI, S.IP., M.M
NIP. 198107152010102001

Pihak Pertama,

RATNIASIH, SE
NIP. 198112232009012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Sasaran (3)	Satuan (4)	Target (5)
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14
2	Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	141

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran :

Rp 163.422.000,00
Rp 1.598.132.208,00



Pihak Kedua,

LISA RIZKY WARDANI, S.IP., M.M
NIP. 199107152010102001

Pihak Pertama,

RATNIASIH, SE
NIP. 198112232009012001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

e-mail pemerintahseberang7@gmail.com - Website - <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOOR AGUSTINAH, S.Sos

Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : LISA RIZKY WARDANI, S.IP., M.M

Jabatan : Lurah Tenun Samarinda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025



Pihak Kedua,

LISA RIZKY WARDANI, S.IP., M.M
NIP. 199107152010102001

Pihak Pertama,

NOOR AGUSTINAH, S.Sos
NIP. 198208282010012039

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI KESEJAHTERAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Sasaran (3)	Satuan (4)	Target (5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14
2.	Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	141
3.	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	24

Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat kecamatan dan Kelurahan

Anggaran :

Rp. 163.422.000,00
Rp. 1.598.132.208,00
Rp. 40.673.000,00

Pihak Kedua,

LISA RIZKY WARDANI, S.IP., M.M
NIP. 199107152010102001

Pihak Pertama,

NOOR AGUSTINAH, S.Sos
NIP. 198208282010012039

bangga
melayani
bangsa



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju

PK PERUBAHAN 2025 KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg diusulkan (2025)		Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang diusulkan (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG														
7	1		KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	34.028.004.028			4.233.417.040		4.233.417.040	46.058.547.752	21,87	12,44		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.430.010.000			271.843.000		271.843.000	4.394.312.119	25	11,19		
7	1	2					0		0		0			
7	1	2	2.01 Koordinasi Penyenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.430.010.000			271.843.000		271.843.000	4.394.312.119	25	11,19		
7	1	2	2.01				0		0		50			
7	1	2	2.01											
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1.270.010.000	PAD	147.360.000	147.360.000	2.346.768.207	25	11,6	
7	1	2	2.01	3							37,5			
7	1	2	2.01	3	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			0,5	0,75				
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kebudayaan Ruang		360.000.000	PAD	34.290.000	34.290.000	2.092.054.391	25	9,53	
7	1	2	2.01	2							37,5			
7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			0,5	0,75				
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kebudayaan Merajid		150.000.000	PAD	8.000.000	8.000.000	1.921.798.391	25	5	

Kode Urusan/ Wilayah Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pencapaian Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota xii Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	1	2	2.01	3											
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			0,5		0,75			37,5	
7	1	2	2.01	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kebudayaan Sungai Kedondong		160.000,000	PAD		11.120,000	11.120,000		1.897.191,391	25	6,95
7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			0,5		0,75			37,5	
7	1	2	2.01	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kebudayaan Mangrove		160.000,000	PAD		14.520,000	14.520,000		1.836.827,391	25	9,08
7	1	2	2.01	2	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			0,5		0,75			37,5	
7	1	2	2.01	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kebudayaan Tenun Sumarinda		180.000,000	PAD		42.274,000	42.274,000		1.920.796,391	25	26,42
7	1	2	2.01	3	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			0,5		0,75			37,5	
7	1	2	2.01	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Kebudayaan Gunung Purjaya		180.000,000	PAD		14.370,000	14.370,000		1.912.066,391	25	8,98
7	1	2	2.01	3	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			0,5		0,75			37,5	
Rata-rata capaian kinerja (%)												25	11,19		

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Peraangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg diarahani (2025)		Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang diarahani (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Profilik Kinerja											SR	SR			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 2)											25	11.19			
Profilik Kinerja											SR	SR			
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		14,446,819,022			280,500,000		280,360,000		19,762,117,642	15.3	1.8
7	1	3			Persentase Jumlah Sumbu dan Prasarana Kehutanan yang Terbongos dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kehutanan		84 Persentase		0		0			0	
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kehutanan		14,073,667,022			229,000,000		228,800,000		19,289,021,242	19.64	1.58
7	1	3	2.02		Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sumbu dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kehutanan yang Diusaha		119 Unit		0		0			0	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kehutanan		20,000,000	PAD	0		0		20,000,000	100	0
7	1	3	2.02	1		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kehutanan		12 Lembaga Kemasyarakatan		12		12		100	
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kehutanan		20,000,000	PAD	0		0		20,000,000	0	0

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Peningkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah/ Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)					
			K	Rp	Standar Dana (f)	K (f)	Rp (f)	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
7	1	3	2.02	4													
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Bagas			1.592.800,000	PAD		0			0	0		
7	1	3	2.02	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						0			5,5	25		
7	1	3	2.02	3	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Bagas			973,585,500	PAD		44,000,000		44,000,000		1,157,710,900	25	4,52
7	1	3	2.02	3	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan						0,5			1	50		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - kelurahan Masjid			1.322.600,000	PAD		0		0		2.664.560,000	0	0
7	1	3	2.02	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						0			5,25	25		
7	1	3	2.02	3	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Masjid			951,359,886	PAD		42,000,000		42,000,000		1,590,104,992	25	4,51
7	1	3	2.02	3	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan						0,5			1	50		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Sungai Kebayang			2.581.000,000	PAD		0		0		2.783,875,500	0	0
7	1	3	2.02	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						0			9	25		

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pirangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg divaluasi (2025)		Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang divaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)				
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	1	3	2.01	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Sungai Kedondang		1,571,959,091	PAD		72,000,000		72,000,000		1,394,417,400	25	4.58
7	1	3	2.01	3		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas		0.75		1.5				50	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Mangrove		1,382,800,000	PAD		0		0		1,591,500,000	0	0
7	1	3	2.02	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit		0		4.75				25	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Mangrove		846,901,639	PAD		38,000,000		38,000,000		996,078,700	25	4.49
7	1	3	2.02	3		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		0.5		1				50	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Temu Samarinda		979,600,000	PAD		0		0		2,026,900,000	0	0
7	1	3	2.02	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		0		3.25				25	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Temu Samarinda		618,543,972	PAD		20,000,000		20,000,000		1,364,545,900	25	4.2

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)				
			K	Rp	Sumber Data (1)	K (1)	Rp (1)	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	1	3	2.02	3	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Keburhan	1 Pokmas / Ormas		0,25		0,5				30		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kelurahan Gunung Pujang		604,600,000	PAD	0		0		1,614,720,000	0	0	
7	1	3	2.02	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terhungan	RT/RT			0		2			25		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Gunung Pujang		426,712,909	PAD		16,000,000		16,000,000		955,287,100	50	3,75
7	1	3	2.02	3	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Keburhan	1 Pokmas / Ormas			0,5		0,75			75		
Rata-rata capaian kinerja (%)											19,44	1,69				
Predikat Kinerja											SR	SR				
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		373,172,000			22,360,000		22,360,000		474,096,400	10,96	5,99
7	1	3	2.06		Jumlah Keluarga Yang dibina	142 Keluarga			0		0			0		
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		75,172,000	PAD		14,360,000		14,360,000		116,423,400	25	19,62

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Peraing Daerah/ Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	1	3	2.06	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	142 Keluarga			33.3		71			50	
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Baga		30,000,000	PAD	0		0		101,146,400	0	0
7	1	3	2.06	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga			0		7.5			25	
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Majid		50,000,000	PAD	0		0		104,678,400	0	0
7	1	3	2.06	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga			0		5			25	
7	1	3	2.06	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Sungai Keluhang		50,000,000	PAD	2,020,000		2,020,000		101,963,400	1.72	4.04

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Peraangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahiti berjalan yg diréalisasi (2025)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Diréalisasi (2025)		Kerangka Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
							K	Rp				Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	K	Rp	K	Rp
7	1	3	2.06	2		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga				6,5		7,75				26,72	
7	1	3	2.06	2		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Mangitpulai		55.000.000	PAD		0		0			92.205.460	0	0
7	1	3	2.06	2		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	45 Keluarga				6		16,75				25	
7	1	3	2.06	2		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Temen Samarinda		50.000.000	PAD		2.020.000		2.020.000			118.649.400	25	4,64
7	1	3	2.06	2		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20 Keluarga				5		10				50	
7	1	3	2.06	2		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Gunung Parang		50.000.000	PAD		3.960.000		3.960.000			102.405.460	25	7,92

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Fasilitasi Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Tipe/Unit			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)				
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	1	1	2.01	6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			0,5		0,5		75		
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			65,000,000	PAD		8,828,000	8,828,000		133,822,040	25	13,58
7	1	1	2.01	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1		2			50	
Rata-rata capaian kinerja (%)											33,33	24,62				
Predikat Kinerja											SB	SB				
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13,815,174,164			3,205,040,348	3,205,040,348		17,551,796,726	44,69	23,2
7	1	1	2.02			Jumlah Laporan	7 Laporan			0		0			6	
7	1	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11,616,962,397	PAD		2,716,770,348	2,716,770,348		14,918,201,246	84,66	23,39
7	1	1	2.02	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	09 Orang/bulan			58		17,25			25	
7	1	1	2.02	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2,147,993,787	PAD		483,500,000	483,500,000		2,341,825,230	23	22,51
7	1	1	2.02	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen			3,5		7			50	
7	1	1	2.02	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		30,218,000	PAD		4,770,000	4,770,000		54,760,230	25	6,5

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prasangka Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg diarahkan (2025)		Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang diarahkan (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)					
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
7	1	1	2.02	3													
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5 Laporan							50			
Rata-rata capaian kinerja (%)												44,89	23,2				
Predikat Kinerja												SB	SB				
7	1	1	2.06		Administrasi Urusan Prasangka Daerah			690,662,000			235,645,000		235,645,000		1,333,816,810	7,14	33,87
7	1	1	2.06		Jumlah Laporan		1 Dokumen				0				0		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10,000,000	PAD		0		0		10,000,000	0	0
7	1	1	2.06	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket				0		0,25			25	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			517,000,000	PAD		222,145,000		222,145,000		1,136,212,510	25	42,97
7	1	1	2.06	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket				0,25		0,5			50	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2,200,000	PAD		0		0		2,200,000	0	0
7	1	1	2.06	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket				0		0,25			25	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Ruang Cetakan dan Penggandaan			24,999,000	PAD		13,500,000		13,500,000		38,428,100	25	54

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Peralokasi Daerah/ Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah/ Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg diyakini (2025)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang diyakini (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s.d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)				
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	1	1	2.06	5												
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			0,25		0,3			50		
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan- Bacant dan Perlatan Perundang-undangan		3.000.000	PAD	0		0		3.000.000	0	0	
7	1	1	2.06	6	Jumlah Dokumen Bahan Bacant dan Perlatan Perundang-Undangan yang Disediakan	64 Dokumen			0		0			0		
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu		12.000.000	PAD	0		0		17.910.000	0	0	
7	1	1	2.06	8	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan			0		6				50	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		91.455.000	PAD	0		0		126.026.000	0	0	
7	1	1	2.06	9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			0		0,25				25	
Rata-rata capaian kinerja (%)												7,14	35,67			
Frekuensi Kinerja												5K	5R			
7	1	3	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintah Daerah		1.261.324.500			37.560.000		37.560.000		1.526.379.988	25	2,98
7	1	3	2.07		Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan			0		0				0	
7	1	3	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		275.328.500	PAD		13.500.000		13.500.000		367.768.988	25	4,9

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg direvisi (2025)		Tytvalan ?			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Direvisi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :													
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya :													
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya :													

Samarinda, 14-07-2025
Mengetahui,
Kepala KECAMATAN SAMARINDA
SEBERANG



ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
NIP: 1986072320041210003

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah/ Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Output/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan yg Revisi/II (2025)		Triwulan I			Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s.d Tahun 2025 (Aakir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (2)	Rp (3)	Sumber Dana (4)	K (5)	Rp (6)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG													
1			36.028.004.028		4.223.417.040			8.693.147.510			10.924.964.290			46.058.547.712	41,54	32,11
1	1		2.430.010.000		271.840.000			651.700.876			823.601.876			4.794.342.119	17,5	30,81
1	1	2		Jumlah Monev Pelayanan Publik	9,05 Persentase		0		0		0				0	
1	1	2	2.430.010.000		271.840.000			651.700.876			823.601.876			4.794.342.119	17,5	30,81
1	1	2	2.201													
1	1	2	2.201	Jumlah Kelembagaan Pelayanan Publik dan Tingkat Kecamatan yang Ditunjuk Layanan	14 Dukungan		0		7		7				58	
1	1	2	2.001	2												
1	1	2	2.001	2	Peringkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan & Tingkat Kecamatan			147.240.000	PAD		249.311.876			316.580.876	17,5	31,23
1	1	2	2.001	2	Jumlah Dukungan Pelayanan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan & Tingkat Kecamatan	2 Dukungan		0,5		0,27					17,5	
1	1	2	2.001	2	Peringkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan & Tingkat Kecamatan - Kategori Sangat			34.280.000	PAD		208.457.000			242.747.000	17,5	67,43
1	1	2	2.001	2	Jumlah Dukungan Pelayanan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan & Tingkat Kecamatan	2 Dukungan		0,5		0,21					17,5	
1	1	2	2.001	2	Peringkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan & Tingkat Kecamatan - Kategori Cukup			6.080.000	PAD		54.449.000			62.449.000	17,5	74,03
1	1	2	2.001	2	Jumlah Dukungan Pelayanan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan & Tingkat Kecamatan	2 Dukungan		0,5		0,25					17,5	
1	1	2	2.001	2	Peringkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan & Tingkat Kecamatan - Kategori Sangat Kurang			11.120.000	PAD		37.864.000			47.004.000	17,5	25,19

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pencapaian Dasar/ Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Hasil Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Ekspektasi (Target)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg diyakini (2025)		Tercapai 1			Tercapai 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang diyakini (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s.d Tahun 2025 (AABD Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (R)	Rp (I)	Sumber Dana (2)	K (R)	Rp (I)	K	Rp	K	Rp			
T 3 2 201 1		Jumlah Dokumen Penyusunan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan & Tingkat Kinerjanya	2 Dokumen			0,5		0,50		0,50						27,5	
T 1 2 201 1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan & Tingkat Kinerjanya - Kebijakan Masyarakat			140.000.000	PAD		14.200.000	PAD		40.000.000		61.000.000		1.020.027.591	0,5	99,37	
T 1 2 201 2		Jumlah Dokumen Penyusunan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan & Tingkat Kinerjanya	2 Dokumen			0,5		0,50		0,50						27,5	
T 1 2 201 2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan & Tingkat Kinerjanya - Kebijakan Timor Samarinda			140.000.000	PAD		42.374.000	PAD		1.750.000		50.024.000		1.020.796.591	0,5	31,27	
T 1 2 201 2		Jumlah Dokumen Penyusunan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan & Tingkat Kinerjanya	2 Dokumen			0,5		0,25		0,25						27,5	
T 1 2 201 2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan & Tingkat Kinerjanya - Kebijakan Gunung Pangajene			140.000.000	PAD		14.370.000	PAD		47.529.000		41.000.000		1.021.066.591	0,5	30,49	
T 1 2 201 1		Jumlah Dokumen Penyusunan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan & Tingkat Kinerjanya	2 Dokumen			0,5		0,25		0,25						27,5	
Rata-rata capaian kinerja (%)																27,5	98,81
Predikat Kinerja																SB	SB
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 2)																27,5	98,81
Predikat Kinerja																SB	SB
T 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUBAHAN			14.446.870.022			340.300.000			2.280.176.792		2.348.699.792		0.762.117.842	38,52	17,64	
T 1 3		Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Kebudayaan yang Terjangkau dan Jumlah Pelayanan dan Ombudsman yang Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat & Kebudayaan	84 Persentase			0		0		0		0			0		

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pernyataan Struktur Urusan - Bidang Urusan/ Pernyataan Struktur Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg diusulkan (2025)		Triwulan I			Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang diusulkan (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s.d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (2)	Rp (3)	Sumber Dana (2)	K (3)	Rp (3)	K	Rp	K	Rp		
T 1 2 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kebudayaan			14.071.467,000					2.225.193,792		2.463.193,792			14.209,421,240	41,87	17,1
T 1 3 2.02		Jumlah Unitas Kegiatan Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebudayaan yang Ditarget	119 Unit			0			0		0				0	
T 1 3 2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kebudayaan			20.000,000	PAD	0	PAD	0	0		0			20.000,000	100	0
T 1 3 2.02 1		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpertemuan dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kebudayaan	11 Lembaga Kemasyarakatan			12			0		0				100	
T 1 3 2.02 4	Evaluasi Kebudayaan			20.000,000	PAD	0	PAD	0	0		0			20.000,000	0	0
T 1 3 2.02 4		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kebudayaan	5 Laporan			0			0		0				0	
T 1 3 2.02 2	Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat - Kebudayaan Ruang			1.190.000,000	PAD	0	PAD	0	0		0			2.412.743,750	22	0
T 1 3 2.02 2		Jumlah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang Terbantu	22 Unit			0			5,1		5,3				22	
T 1 3 2.02 1	Pemberdayaan Masyarakat di Kebudayaan - Kebudayaan Ruang			973.345,500	PAD		44.000,000	PAD			80.498,200			13.498,200	50	12,75
T 1 3 2.02 3		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Kebudayaan	2 Pokmas/ Ormas			0,5			0,7		1				70	
T 1 3 2.02 2	Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat - Kebudayaan Masjid			1.121.000,000	PAD	0	PAD	0			513.000,000			513.000,000	22	33,09
T 1 3 2.02 2		Jumlah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang Terbantu	21 Unit			0			5,20		5,20				21	
T 1 3 2.02 2	Pemberdayaan Masyarakat di Kebudayaan - Kebudayaan Masjid			973.345,000	PAD		42.000,000	PAD			391.951,200			433.951,200	59	46,29

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penerimaan Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Bila Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tegal Berjalan yg Berjalan (2025)		Tribunal 1			Tribunal 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dilaksanakan (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kota s/d Tahun 2025 (AAWR Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)					
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (2)	Rp (3)	Sumber Dana (2)	K (4)	Rp (5)	K	Rp	K	Rp						
1	1	3	2.02	1																
					Jumlah Pokman dan Ormas yang Melaksanakan Pembinaan Masyarakat di Kuluban	2 Pokman/ Ormas	0.2			0.2		1						20		
7	1	3	2.02	1	Pembinaan Sensus dan Prawana Kelurahan - Kelurahan Tegal Kedung		2.581.000.000	PAD	0		PAD	0					2.581.000.000	25	0	
7	1	3	2.02	2	Jumlah Sensus dan Prawana Kelurahan yang Terkagang	10 Unit			0		0		0						25	
7	1	3	2.02	3	Pembinaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Tegal Kedung		1.572.000.000	PAD		72.000.000	PAD		341.378.700		421.378.700		1.394.417.400	50	27,55	
7	1	3	2.02	1	Jumlah Pokman dan Ormas yang Melaksanakan Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokman/ Ormas			0.75			0.75							50	
7	1	3	2.02	2	Pembinaan Sensus dan Prawana Kelurahan - Kelurahan Mangrove		1.382.000.000	PAD	0		PAD	0						1.382.000.000	25	0
7	1	3	2.02	2	Jumlah Sensus dan Prawana Kelurahan yang Terkagang	10 Unit			0		4.75		4.75						25	
7	1	3	2.02	1	Pembinaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Mangrove		840.000.000	PAD		30.000.000	PAD		0		30.000.000		840.000.000	50	4.49	
7	1	3	2.02	1	Jumlah Pokman dan Ormas yang Melaksanakan Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokman/ Ormas			0.5			0.5							50	
7	1	3	2.02	2	Pembinaan Sensus dan Prawana Kelurahan - Kelurahan Tegal Sembada		970.000.000	PAD	0		PAD		421.400.000		421.400.000		2.020.000.000	25	44.43	
7	1	3	2.02	1	Jumlah Sensus dan Prawana Kelurahan yang Terkagang	10 Unit			0		3.25		3.25						25	
7	1	3	2.02	1	Pembinaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Tegal Sembada		610.545.077	PAD		26.000.000	PAD		397.407.300		421.407.300		1.314.545.000	50	68.46	

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Giatness/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg diyakini (2022)		Tetapan 1			Tetapan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang diyakini (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kota s.d Tahun 2021 (GAB Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	Sumber Dana (2)	K (2)	Rp (2)	K	Rp	K	Rp		
T 1 3 2.02 3		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembekalan Masyarakat di Kulmban	1 Pokmas / Ormas			0,2			0,2		0,1					30
T 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Kulmban Gunung Pajang			404.000.000	PAD		0	PAD		22.220.000	22.220.000		1.618.720.000	12	4,3	
T 1 3 2.02 2		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit			3			2		2					25
T 1 3 2.02 3	Pembekalan Masyarakat di Kelurahan Kulmban Gunung Pajang			426.712.900	PAD		16.000.000	PAD		16.200.000	16.200.000		895.207.100	72	8,02	
T 1 3 2.02 3		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembekalan Masyarakat di Kulmban	1 Pokmas / Ormas			0,5			0,2		0,7					70
Rata-rata capaian Kinerja (%)															42,87	17,3
Prestasi Kinerja															58	88
T 1 5 2.04	Pembekalan dan Kecakuleran Keluarga Tingkat Komunitas dan Kelurahan			211.171.000			22.260.000			62.940.000	62.200.000		474.090.000	15,96	12,86	
T 1 3 2.04		Jumlah Keluarga Yang diakses	142 Keluarga			0			0		0					0
T 1 3 2.04 2	Peningkatan Kredite Keluarga dalam Membangun Kota Sama satu-Keluarga, Warga, dan Kampung Masyarakat			71.171.000	PAD		14.200.000	PAD		9.500.000	24.220.000		118.421.400	30	11,3	
T 1 3 2.04 2		Jumlah Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kredite Keluarga dalam Membangun Kota Sama satu- Keluarga, Warga, dan Kampung Masyarakat	142 Keluarga			33,3			33,3		71					90

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Peningkat Daerah/ Urusan/Bidang Urusan/ Fungsional Daerah/ Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Output/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi berjalan yg diwujudkan (2025)		Triwulan 1			Triwulan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang diwujudkan (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Aakir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (R)	Rp (I)	Sumber Dana (2)	K (R)	Rp (I)	K	Rp	K	Rp				
7	1	3	236	1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Memenuhi Kebutuhan Kesehatan, Waga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Majal			30,000,000	PAD	0		PAD		0,000,000	0,000,000	101,140,000	21	17,09
7	1	3	236	1	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Memenuhi Kebutuhan Kesehatan, Waga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga				0			11				21	
7	1	3	236	2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Memenuhi Kebutuhan Kesehatan, Waga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Majal			30,000,000	PAD	0		PAD		1,475,000	1,475,000	104,670,000	21	24,05
7	1	3	236	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Memenuhi Kebutuhan Kesehatan, Waga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga				0			5				21	
7	1	3	236	2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Memenuhi Kebutuhan Kesehatan, Waga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Majal			30,000,000	PAD	2,000,000		PAD		4,000,000	4,000,000	104,670,000	26,72	17,72
7	1	3	236	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Memenuhi Kebutuhan Kesehatan, Waga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga				0,1			121				26,72	
7	1	3	236	2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Memenuhi Kebutuhan Kesehatan, Waga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Majal			30,000,000	PAD	0		PAD		0	0	102,200,000	23	0

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Persetujuan Daerah/ Urusan/Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah/ Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Urusan/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tobelo Sepuluh 12 Desember 2025		Trimester 1			Trimester 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Ditargetkan (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota di Tahun 2025 (AABR Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)					
			K	Rp	jumlah Data (1)	K (4)	Rp (5)	jumlah Data (7)	K (8)	Rp (9)	K	Rp	K	Rp						
7	1	1	2.04	2																
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Program Konsultasi Keluarga dalam Membangun Karya Sama antar- Keluarga, Warga, dan Komunitas Masyarakat	43 Keluarga			0			10.73		10.73				23		
7	1	1	2.05	2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Membangun Karya Sama antar-Keluarga, Warga, dan Komunitas Masyarakat - Kelurahan Tenas Samarinda		50.000.000	PAD		2.025.000	PAD		14.195.000		35.400.000			113.549.600	30	41.23
7	1	1	2.06	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Program Konsultasi Keluarga dalam Membangun Karya Sama antar- Keluarga, Warga, dan Komunitas Masyarakat	20 Keluarga			1			5		10					10	
7	1	1	2.06	2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Membangun Karya Sama antar-Keluarga, Warga, dan Komunitas Masyarakat - Kelurahan Ombing Panjang		50.000.000	PAD		1.900.000	PAD		6.242.000		10.332.000			102.605.600	50	20.4
7	1	1	2.06	2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Program Konsultasi Keluarga dalam Membangun Karya Sama antar- Keluarga, Warga, dan Komunitas Masyarakat	20 Keluarga			7.25			7.25		14.5					50	
Rata-rata capaian kinerja (%)																35.96	22.80			
Profilor Kinerja																50	50			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 7)																36.52	17.64			
Profilor Kinerja																50	50			
7	1	1			PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PENERBITAN DAERAH KABUPATENAROTA		17.114.111.000			3.701.214.000			3.753.246.000		3.854.605.027			21.900.117.000	49.81	41.40
7	1	1			Indeks Kinerja Masyarakat (IKM)	0,73 Pemerintah			0			0		0					0	

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pernyataan Dampak/ Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tobak berjalan 72 Berkas (2025)		Trenitas 1			Trenitas 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang direalisasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota di Tahun 2025 (AAWR Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	Sumber Dana (2)	K (2)	Rp (2)	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
T 1 1 1 2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			225,211,000				30,700,400				0,900,000		47,000,400		210,774,000	19.31	29.4
T 1 1 1 2.01		Nilai AKIP	70.000			0				0							0	
T 1 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah			113,211,000	PAD		20,000,400	PAD		1,500,000		11,000,400		100,700,000		100,700,000	30	29.70
T 1 1 1 2.01 1		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			1.25				1.25		2.5					30	
T 1 1 1 2.01 4	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja RKPD			30,000,000	PAD		10,700,000	PAD		1,000,000		24,300,000		24,300,000		24,300,000	71	40.14
T 1 1 1 2.01 4		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja RKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja RKPD	1 Laporan			0.5				0.25		0.25					71	
T 1 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			61,000,000	PAD		8,000,000	PAD		0		8,000,000		53,000,000		53,000,000	50	13.28
T 1 1 1 2.01 7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1				1		2					50	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																	58.33	29.4
Prendik Kinerja																	0	0%
T 1 1 1 2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13,813,730,104			2,207,040,348			2,517,000,249		5,712,700,317		17,553,790,226		17,553,790,226	41.67	41.42
T 1 1 1 2.01		Jumlah Laporan	7 Laporan			0				0		0					0	
T 1 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1,610,462,307	PAD		1,710,770,348	PAD		2,136,104,419		4,871,530,707		14,950,201,248		14,950,201,248	21	41.91
T 1 1 1 2.02 1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	09 Orang/bulan			08				17.25		17.25					21	
T 1 1 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2,147,993,767	PAD		483,390,000	PAD		361,511,700		845,613,700		2,340,821,200		2,340,821,200	50	34.34

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Crasan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg diarahkan (2025)		Tetapan 1			Tetapan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang diarahkan (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJAD Kota s/d Tahun 2025 (AAMr Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)												
			K	Rp	Sumber Data (1)	K (4)	Rp (5)	Sumber Data (2)	K (6)	Rp (7)	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
7	1	1	1.02	2																							
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Administrasi Pembinaan Tegal ASN	14 Dokumen			3,7										50								
7	1	1	1.02	3																							
					Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kerangka Akhir Tahun SKPD					6,710,000	PAD								50	5,7							
7	1	1	1.02	4																							
					Jumlah Laporan Kerangka Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kerangka Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			2,21											50							
Rata-rata capaian kinerja (%)																41,47	41,42										
Profilas Kinerja																58	58										
7	1	1	1.06		Administrasi Urusan Pemerintah Daerah					661,662,000				235,645,000				64,415,200		806,090,200	1,133,816,616	32,14	60,50				
7	1	1	1.06		Jumlah Laporan	1 Dokumen			0					0									0				
7	1	1	1.06	1	Penyusunan Kerangka Kerangka Lingkup/Perencanaan Rencana Kerja					10,000,000	PAD		0	PAD						0			10,000,000	25	0		
7	1	1	1.06	1	Jumlah Paket Kerangka Kerangka Lingkup/Perencanaan Rencana Kerja yang Dibuat	1 Paket			0					0,25										0,25			
7	1	1	1.06	2	Penyusunan Perencanaan dan Perencanaan Kerja					317,000,000	PAD			225,140,000	PAD						(54,289,200)	376,544,200	1,136,341,316	59	73,83		
7	1	1	1.06	2	Jumlah Paket Perencanaan dan Perencanaan Kerangka yang Dibuat	1 Paket			0,25					0,25										0,5			
7	1	1	1.06	4	Penyusunan Bahan Lengkap Kerja					2,200,000	PAD		0	PAD							0			2,200,000	25	0	
7	1	1	1.06	4	Jumlah Paket Bahan Lengkap Kerja yang Dibuat	1 Paket			0					0,25											0,25		
7	1	1	1.06	5	Penyusunan Barang Ceklist dan Pengembangan					24,995,000	PAD			13,390,000	PAD						0				13,390,000	30	14

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah/ Sisa Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg diyakini (2025)		Tribunal 1			Tribunal 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Derealisasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (AAWR Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
			K	Rp	Number Data (G)	K (G)	Rp (H)	Number Data (I)	K (J)	Rp (K)	K	Rp	K	Rp				
7	1	1	2.07	10		134.200.000	PAD		6.880.000	PAD		15.200.000		22.000.000		30.280.000	25	17,47
7	1	1	2.07	10				5 Unit									25	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	47,86	64,14
Predikat Kinerja																	5	8
7	1	1	2.08			570.382,542			106.435,282			106.386,181		204.821,475		546.664,045	41,47	35,79
7	1	1	2.08					12 Laporan	0			0		0			0	
7	1	1	2.04	2		577.382,542	PAD		46.181,282	PAD		57.436,181		199.821,475		662.204,045	50	31,25
7	1	1	3.08	2				1 Laporan	0,25			0,25		0,5			50	
7	1	1	2.06	3		12.500.000	PAD		0	PAD		0		0		12.500.000	25	0
7	1	1	2.04	3				1 Laporan	0			0,25		0,25			25	
7	1	1	2.04	4		20.000.000	PAD		11.250.000	PAD		3.750.000		20.000.000		71.250.000	35	100
7	1	1	2.04	4				1 Laporan	0,25			0,25		0,5			50	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	41,47	36,79
Predikat Kinerja																	68	58
7	1	1	2.10			415.400.000			17.550.000			18.845.209		243.795.209		421.796,377	30	38,94
7	1	1	2.10					12 Laporan	0			0		0			0	

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pencapaian Daerah/ Urusan/Bidang Urusan/ Fungsi/Tugas Daerah/ Sub Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Gubernur/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg diyakini (2025)		Tributan 1			Tributan 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang diyakini (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota di Tahun 2025 (AAW Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (1)	Rp (1)	Sumber Dana (2)	K (2)	Rp (2)	K	Rp	K	Rp		
Faktor Pendukung Keberhasilan Program :																
Faktor Penghambat Pemcapaian Kinerja :																
Terdah Langkah Yang Diperlukan Dalam RKPD Kabupaten/Kota Berikutnya :																
Terdah Langkah Yang Diperlukan Dalam RPJMD Kabupaten/Kota Berikutnya :																

Samarinda, 14-07-2025
Mengetahui,
Kepala KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG



ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 198607232004121003

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan dg Revisi (2025)		Tahun 1			Tahun 2			Tahun 3			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Revisi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
			K	Rp	Sumber Dana (0)	K (1)	Rp (1)	Sumber Dana (1)	K (2)	Rp (2)	Sumber Dana (2)	K (3)	Rp (3)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				4.402.004,00				4.233.417,000					4.376.091,000						61,83	61,40
				4.402.004,00				4.233.417,000					4.376.091,000						61,83	61,40
				2.000.000,000				211.243,000					476.633,376						62,3	41,76
				81,00 Sisa				0					0						0	
				2.400.000,000				271.940,000					553.266,752						62,5	61,76
				12 Dekameter				0					2						71	
				1.270.000,000				147.209,000					226.812,376						62,5	34,70
				2 Dekameter				0,5					0,5						62,5	
				300.000,000				34.290,000					206.707,000						62,5	61,7
				2 Dekameter				0,5					0,5						62,5	
				100.000,000				0,000,000					54.440,000						62,5	62,00
				2 Dekameter				0,5					0,5						62,5	
				100.000,000				11.120,000					33.894,000						62,5	50,60
				2 Dekameter				0,5					0,5						62,5	
				300.000,000				34.320,000					63.344,000						62,7	36,28

Kode Group/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penasarhan Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah/ Ses. Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ (Output) (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg diwujudkan (2019)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang diwujudkan (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota sd Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)				
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (2)	Rp (3)	Sumber Dana (4)	K (5)	Rp (6)	Sumber Dana (7)	K (8)	Rp (9)	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sistem dan Prosesus Kelurahan - Kelurahan Mangrove			1.392.000,000	PAD		0	PAD		0	PAD		711.120,000	711.120,000	1.324.000,000	77,85	51,02	
7	1	3	2.02	2		Jumlah Sarana dan Prosesus Kelurahan yang Terbangun	14 Unit			0		4,75		10			14,71				77,43	
7	3	3	2.03	3	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Mangrove			348.000,000	PAD		18.000,000	PAD		180.000,000	PAD		227.000,000	440.100,000	1.427.000,000	75	55,47	
7	1	3	2.03	3		Jumlah Tahunan dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Tahunan / Ormas			0,5		0,5		0,5			1,5				75	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prosesus Kelurahan - Kelurahan Tema Samsat			479.000,000	PAD		0	PAD		435.400,000	PAD		116.000,000	973.400,000	2.164.000,000	75	49,27	
7	1	3	2.02	2		Jumlah Sarana dan Prosesus Kelurahan yang Terbangun	13 Unit			0		1,25		4,5			6,75					75
7	1	3	2.03	3	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Tema Samsat			618.540,977	PAD		24.000,000	PAD		494.540,977	PAD		93.000,000	729.240,977	1.491.540,977	75	84,13	
7	1	3	2.03	3		Jumlah Tahunan dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Tahunan / Ormas			0,25		0,25		0,25			0,75					75
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prosesus Kelurahan - Kelurahan Gunung Pangajene			494.000,000	PAD		0	PAD		21.230,000	PAD		146.000,000	177.230,000	1.701.140,000	75	29,72	
7	1	3	2.02	2		Jumlah Sarana dan Prosesus Kelurahan yang Terbangun	8 Unit			0		2		4			8					75
7	1	3	2.02	3	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan - Kelurahan Gunung Pangajene			426.712,000	PAD		14.000,000	PAD		18.200,000	PAD		171.342,000	207.542,000	1.148.632,000	87	49,84	
7	1	3	2.02	3		Jumlah Tahunan dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Tahunan / Ormas			0,5		0,25		0,5			0,85					87
Rata-rata capaian kinerja (%)																			76,62	63,62		
Perilaku Kinerja																			7	8		
7	1	3	2.04		Pembudayaan dan Kempohan Kinerja Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			571.775,000			21.340,000			49.271,000			54.000,000	140.071,000	729.410,000	60,91	39,31	

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Garis-garis Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan 2023		Trimester 1			Trimester 2			Trimester 3			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Berjalan (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (2)	Rp (3)	Sumber Dana (1)	K (2)	Rp (3)	Sumber Dana (1)	K (2)	Rp (3)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
T 1 3 2.06		Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Kecerdikan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	142 Keluarga			0		0		0		0		0					0
T 1 3 2.06 2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			73,772,000	PAD		14,500,000	PAD		9,000,000	PAD	2,500,000		26,570,000		118,733,000		74.08	36.24
T 1 3 2.06 2		Jumlah Keluarga yang Mikuti Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	142 Keluarga			33.5		33.5		33.05		39.07						74.08	
T 1 3 2.06 2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Baga			32,000,000	PAD	0	PAD	5,945,000	PAD	7,875,000		16,810,000		19,222,000		59	33.64		33.64
T 1 3 2.06 2		Jumlah Keluarga yang Mikuti Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga			0		7.5		7.5		13						50	
T 1 3 2.06 2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Majid			32,000,000	PAD	0	PAD	12,475,000	PAD	9,200,000		21,710,000		121,300,000		50	43.43		43.43
T 1 3 2.06 2		Jumlah Keluarga yang Mikuti Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	23 Keluarga			0		3		3		10						50	
T 1 3 2.06 2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat - Kelurahan Tanjung Kelabang			61,000,000	PAD	2,020,000	PAD	6,600,000	PAD	11,220,000		22,190,000		114,580,000		51.72	44.37		44.37
T 1 3 2.06 2		Jumlah Keluarga yang Mikuti Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 Keluarga			0.5		7.25		7.25		10						51.72	

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah/ Dasar Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Output/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan 2025		Triwulan 1		Triwulan 2			Triwulan 3			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota di Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (2)	Rp (3)	Sumber Dana (2)	K (3)	Rp (3)	Sumber Dana (3)	K (3)	Rp (3)	K	Rp	K	Rp		
2	1	3	2.06	1		30.000.000	PAD	0		PAD	7.225.000	PAD	11.675.000		21.600.000	110.503.400	50	27.34	
7	1	1	2.06	2				41 Kelurahan		0		18.75		18.75	21,3			50	
1	1	3	2.06	3		30.000.000	PAD		3.500.000	PAD	15.100.000	PAD	3.400.000		21.400.000	113.045.400	75	32.89	
3	1	3	2.06	3				20 Kelurahan		5				5	10			75	
7	1	3	2.06	1		50.000.000	PAD		3.500.000	PAD	6.240.000	PAD	6.400.000		16.670.000	108.015.400	75	31,3	
1	1	3	2.06	2				29 Kelurahan		7.25		7.25		7.25	21,75			75	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		60,91	29,81
Profilas Kinerja																		8	58
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN/PROGRAM 2)																		60,77	63,01
Profilas Kinerja																		6	6
7	1	1				17.111.111,000			0,701214240		3.624.010,407		2.762.066,784		10.307.051,577	25.177.068,100	72,22	60,1	
7	1	1						0		0		0		0				0	

Kode Urusan/ Midang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan Tingkat)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan yg Berakhir (2025)		Terdapat 1			Terdapat 1			Terdapat 2			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Berjalan (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota di Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)				
			K	Rp	Sumber Dana (D)	K	Rp	(I)	Sumber Dana (D)	K	Rp	(I)	Sumber Dana (D)	K	Rp	(I)	K	Rp	K	Rp		
2	1	1	2.01		228,711,000			56,103,400			22,900,000			91,000,504		118,500,904		408,200,000	83.31	69.49		
7	1	1	2.01				0			0			0						0			
7	1	1	2.01	1	113,211,000	PAD		28,385,400	PAD		3,500,000	PAD		88,312,600		49,630,300		179,234,000	73	88.19		
7	1	1	2.01	2				1.25			1.25			1.25					75			
7	1	1	2.01	4	30,000,000	PAD		19,170,000	PAD		3,000,000	PAD		0		24,570,000		74,570,000	100	69.34		
7	1	1	2.01	4				0.5			0.25			0.25					100			
7	1	1	2.01	1	61,000,000	PAD		4,020,000	PAD		0	PAD		23,030,504		54,300,504		109,010,000	75	52.36		
7	1	1	2.01	2				1			1			1					75			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			83.31	69.49		
Prestasi Kinerja																			7	6		
7	1	1	2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11,815,174,364		3,205,840,340			2,992,530,169			2,291,915,036		4,889,620,919		28,374,011,204	60.31	58.56		
7	1	1	2.01	Pertemuan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang diteliti dan dilaporkan secara lengkap waktu	7 Laporan			0			0			0					0			
7	1	1	2.01	1	Pembelian Caji dan Tunjangan ASN		11,630,942,007	PAD		2,716,776,548	PAD		2,150,364,619	PAD		2,805,871,203		4,928,800,012		17,703,141,000	21	39.64
7	1	1	2.01	1	Jumlah Orang yang Menerima Caji dan Tunjangan ASN	48 Orang bulan		18			17.25			17.25					21			
7	1	1	2.01	2	Pembelian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2,141,903,767	PAD		44,300,000	PAD		436,363,700	PAD		236,003,701		1,101,940,304		2,370,000,000	75	53.62
7	1	1	2.01	1	Jumlah Dokumen Hasil Pembelian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen		5.5			5.5			5.5		10.5			75			

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pencapaian Dasar/ Urusan/Bidang Urusan/ Pencapaian Dasar dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg direvisi (2017)		Tercapai 1			Tercapai 2			Tercapai 3			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang direvisi (2017)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)			
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K (2)	Rp (3)	Sumber Dana (2)	K (2)	Rp (3)	Sumber Dana (3)	K (2)	Rp (3)	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	1	1	2.02	5	Kontrol dan Penanganan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		50,218,000	PNL		4,775,000	PNL		0	PNL		0	4,775,000		14,780,750	75	9.5
7	1	1	2.02	7		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Keuangan Penanganan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		1.25			1.25		1.25		1.25				75	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				94.33	94.54
Profil Kinerja																				8	8
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		499,942,000			251,043,000			109,510,240			119,333,000	511,049,640	1,444,885,000	57.14	77.97	
7	1	1	2.06			Penyusunan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terencana	1 Laporan		0			0		0		0				0	
7	1	1	2.06	1		Penyusunan Kegiatan Jadwal Lantik/Pemungutan Sampah Kantor		10,000,000	PNL	0	PNL	0	PNL	0		0		10,000,000	0	50	0
7	1	1	2.06	1			Jumlah Paket Kegiatan Jadwal Lantik/Pemungutan Sampah Kantor yang Disalurkan	1 Paket	0		0.25		0.25		0.25		0.25			50	
7	1	1	2.06	2		Penyediaan Fasilitas dan Perbaikan Kantor		117,000,000	PNL		222,545,000	PNL		154,310,240	PNL		70,070,000	454416,240	1,214,282,240	75	87.97
7	1	1	2.06	2			Jumlah Paket Fasilitas dan Perbaikan Kantor yang Disalurkan	1 Paket		0.25		0.25		0.25		0.25		0.75		75	
7	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		2,200,000	PNL	0	PNL	0	PNL	0		0		2,200,000	0	50	0
7	1	1	2.06	4			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disalurkan	1 Paket		0		0.25		0.25		0.25		0.25		50	
7	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman		16,991,000	PNL		11,700,000	PNL		0	PNL		0	11,700,000	16,429,100	75	54
7	1	1	2.06	7			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disalurkan	1 Paket		0.25		0.25		0.25		0.25		0.75		75	
7	1	1	2.06	8		Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perantara Lainnya		3,000,000	PNL	0	PNL		0	PNL		0		3,000,000	0	25	0
7	1	1	2.06	9			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perantara Lainnya yang Disalurkan	34 Dokumen		0		0		0		21		21		29	
7	1	1	2.06	6		Pelaksanaan Kegiatan Tata		12,000,000	PNL	0	PNL		3,000,000	PNL		6,650,000	11,000,000	24,000,000	75	100	

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pencapaian Dampak/ Urusan/Bidang Urusan/ Pencapaian Dampak Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Dampak/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan yg diusulkan (2025)		Tribulan 1			Tribulan 2			Tribulan 3			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang diusulkan (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kota di Tahun 2025 (AAIR Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K	Rp	(1)	K	Rp	(2)	K	Rp	(3)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
T 1 1 2.00 2		Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Konsultasi, Survei Dewa Ar dan Lurah yang Diantarkan	1 Laporan				0,25					0,25		0,25					75	
T 1 1 2.00 3	Pelayanan Jasa Perbaikan dan Partisipasi Komunitas			12.500.000	PAD		0		PAD		0		PAD		2.250.000		2.250.000	14.750.000	50	18
T 1 1 2.00 3		Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Perbaikan dan Partisipasi Komunitas yang Diantarkan	1 Laporan				0					0,25		0,25					50	
T 1 1 2.00 4	Pelayanan Jasa Pelayanan Urusan Kantor			20.000.000	PAD		1.250.000		PAD		0,750.000		PAD		0		20.000.000	12.250.000	75	100
T 1 1 2.00 4		Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Diantarkan	1 Laporan				0,25					0,25		0,25					75	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			66,47	61,39
Profilak Kinerja																			5	8
T 1 1 2.00	Pendidikan Berbasis MKB Dalam Peningkat Urusan Pemerintahan Desah			415.400.000			27.250.000				100.400.200			101.011.000		100.000.000		120.000.177	75	54,48
T 1 1 2.00		Peningkatan Berbasis MKB Dalam Peningkat Urusan Pemerintahan Desah dalam bentuk buku	12 Laporan				0				0			0					0	
T 1 1 2.00 1	Pelayanan Jasa Pendidikan, Bina Pendidikan, dan Peningkat Kualitas Persewaan Desah dan Kemandirian Desah Adanya			100.300.000	PAD		11.520.000		PAD		26.011.200		PAD		7.000.000		85.451.200	107.313.007	75	20,12
T 1 1 2.00 1		Jumlah Kemandirian Persewaan Desah dan Kemandirian Desah Jumlah yang Dipecahkan dan dibagikan Paketnya	27 Unit				0,75				0,75			0,75					20,25	75
T 1 1 2.00 2	Pelayanan Jasa Pendidikan, Bina Pendidikan, Peningkat dan Peningkat Kemandirian Desah Operasional atau Layanan			14.000.000	PAD		4.000.000		PAD		0,250.000		PAD		0		12.750.000	100.011.000	75	43,89
T 1 1 2.00 2		Jumlah Kemandirian Desah Operasional atau Layanan yang Dipecahkan dan dibagikan Paket dan Pemasangannya	7 Unit				1,75				1,75			1,75					5,25	75
T 1 1 2.00 4	Pendidikan Perilaku dan Moral Lainnya			104.000.000	PAD		27.730.000		PAD		0,280.000		PAD		20.000.000		86.810.000	171.710.000	75	62,69

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pencapaian Dasar/ Urusan Bidang Urusan/ Pencapaian Dasar/ Dasar Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (Output)	Tetapan 1			Tetapan 2			Tetapan 3			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Ditargetkan (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota di Tahun 2025 (ASAP/ Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)									
			K	Rp	Sumber Dana (1)	K	Rp	(2)	K	Rp	(3)	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
7	1	1	2.00	0													75								
7	1	1	2.00	0													75	42.13							
7	1	1	2.00	0													75								
Rata-rata capaian kinerja (%)																	75	54.68							
Predikat Kinerja																	B	B							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KELOMPOK/PROGRAM (1)																	75.23	68.1							
Predikat Kinerja																	B	B							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASINYA DARI SELURUH PROGRAM																	0	4,233,073,000	0	6,399,490,455	0	9,774,691,075	20,911,294,905		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	67.83	61.68							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	B	B							
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian :																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Terdapat Laporan Yang Diperlukan Dalam RKPD sebagaimana berikut ini :																									
Terdapat Laporan Yang Diperlukan Dalam RPJMD sebagaimana berikut ini :																									

Samarinda, 16-10-2025
Mengetahui,
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

ANGY KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 198607232004121003

Kategori Program Kategori Sub-Kategori	Kategori Program Kategori Sub-Kategori	Kategori Program Kategori Sub-Kategori	Tingkat Kinerja dan Kualitas RUPK Desa Tahun Keberhasilan Berkas (2024)		Tahap 1				Tahap 2				Tahap 3				Tahap 4				Rendahnya Kualitas dan Kualitas RUPK Desa Tahun Keberhasilan Berkas (2024)		Rendahnya Kualitas dan Kualitas RUPK Desa Tahun 2024 Keberhasilan Berkas (2024)		Tingkat Capaian Kualitas dan Kualitas RUPK Desa 2024-2025		
			K	Sp	Hasil RUPK (%)	K	Sp	Hasil RUPK (%)	Hasil RUPK (%)	Hasil RUPK (%)	Hasil RUPK (%)	K	Sp	Hasil RUPK (%)	Hasil RUPK (%)	Hasil RUPK (%)	K	Sp	Hasil RUPK (%)	Hasil RUPK (%)	K	Sp	K	Sp	K	Sp	
Terdapat 1 (satu) yang Capaian (Berkas RUPK) Sub-kategori Indikator																											

Samarinda, 27-02-2025
 Mengetahui,
 Kepala KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

 ANITA KOSRAYOGE S.Si
 NIP. 199907232004121001



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA SAMARINDA DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum kesatu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Samarinda Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA SAMARINDA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap dan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di Kota Samarinda.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
16. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
19. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU meliputi:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri atas:
 - a. IKU Pemerintah Kota Tahun 2025-2029; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tahun 2025-2029
- (2) IKU Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB III PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. Dokumen RPJMD dan atau Renstra PD, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit kerja organisasi yang bersangkutan meliputi:

- a. spesifik
- b. dapat dicapai
- c. relevan
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantitaskan dan diukur.

Pasal 6

IKU sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 September 2025



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 68 TAHUN 2025
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
 TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pendapatan}}$ $\times 100$ <p>IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran</p>	Badan Pusat Statistik Kota Samarinda	
2	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu	$f(k) = \frac{PDRB(k)}{PDRB(k-1)} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik Kota Samarinda	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
				indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu	K: Komponen t : tahun berjalan (atas dasar harga konstan) t- 1 : Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)		
3	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif	PDRB per kapita	Juta Rupiah	Untuk memberikan gambaran tentang kesejahteraan ekonomi rata-rata penduduk di suatu daerah	$PDRB \text{ Per Kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{Populasi}$ Keterangan: $PDRB_{ADHB}$: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Populasi: jumlah penduduk regional t : periode	Badan Pusat Statistik Kota Samarinda	
4	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif	Rasio Gini	Indeks	Untuk mengukur ketimpangan pendapatan	$Rasio \ Gini = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ Dimana: p_i = Proporsi Kumulatif dari Penerima Pendapatan i Y_i = Proporsi Kumulatif pengeluaran per kapita i n = jumlah observasi	Badan Pusat Statistik	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Terwujudnya Kota Layak Huni yang Aman, Bersih dengan Infrastruktur yang Berkualitas	Indeks Kota Layak Huni (Liveable City Index)	Indeks	Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas hidup di suatu kota, tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga sosial, lingkungan, dan infrastruktur	$IKLH = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Pe}}{\text{Total Unsur Yang Ter}}$ IKLH = Indeks Kota Layak Huni	Brida Kaltim	
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Surat Edaran MenpanRB Nomor 6 tahun 2025 serta Grand Design RB Nasional dan Roadmap RB Nasional 2025 - 2029	Indeks Reformasi Birokrasi = Nilai indeks RB General + Indeks RB tematik	Kementerian PAN dan RB	
7	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	Untuk mengetahui Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal	$\text{(Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi dengan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas)} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
				yang pernah dijalani			
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)</i> atau <i>Mortpack</i>	BPS Kota Samarinda	
9	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	Untuk dapat menilai seberapa besar masalah gizi di masyarakat. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk	Prevalensi stunting = jumlah balita pendek (PB/U atau TB/U < -2SD) + jumlah balita sangat pendek (PB/U atau TB/U < -3SD) / Jumlah balita	Dinas Kesehatan, SSGI/SKI	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
				menyusun kebijakan, menentukan sasaran intervensi, dan mengevaluasi efektivitas program yang sudah berjalan. serta menjadi dasar evidence-based policy yang penting untuk intervensi gizi, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan manusia secara keseluruhan	yang diukur panjang atau tinggi badannya x 100%		
10	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	Untuk mengetahui ketimpangan gender	$IKG = 1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ <p>IKG : Indeks Ketimpangan Gender G_P: Indeks Perempuan G_L: Indeks Laki-laki $G_{P,L}$: Agregasi Indeks Dimensi dengan rata-rata geometrik</p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
11	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	%	Menilai peran strategis sektor perdagangan dalam perekonomian daerah	Kontribusi (%) = (Nilai PDRB ADHB Sektor Perdagangan dan Jasa / Total Nilai PDRB ADHB) x 100%	BPS Kota Samarinda	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Indeks Kemandirian Fiskal	Indeks	Untuk mendorong optimalisasi PAD, dan untuk mengukur tingkat ketergantungan daerah pada pusat	IKF = (Pendapatan Asli Daerah / Total Pendapatan Daerah) × 100%	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	
13	Meningkatnya kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	Untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ <p> <i>i</i> : Indikator ke-1, 2, 3, ..., 7, 8, dan 9 <i>j</i> : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98 <i>Y_j</i> : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-<i>j</i> <i>a_i</i> : Bobot masing-masing indikator ke-<i>i</i> <i>X_{ij}</i> : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-<i>i</i> pada kabupaten/kota ke-<i>j</i> </p>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	
14	Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan	%	Untuk mengetahui banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ <p> dimana: <i>a</i>: 0 <i>z</i>: Garis kemiskinan </p>	BPS, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
				dengan total populasi penduduk regional	y_i : Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$ q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n : Jumlah penduduk		
15	Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran	Jumlah Pengangguran Dibagi Jumlah Angkatan Kerja Dikali 100%	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	Tingkat Pengangguran terdapat dalam survey BPS
16	Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	Indeks yang untuk mengetahui tingkat risiko bencana (<i>Risk</i>), dengan mempertimbangkan potensi bahaya (<i>hazard</i>), tingkat kerentanan (<i>Vulnerability</i>) dan kapasitas wilayah (<i>Capacity</i>) dalam menghadapi bencana	$R = H \times V / C$ R : Risiko H : Hazard / Bahaya V : Vulnerability / Kerentanan C : Capacity / Kapasitas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan	$IPT = (WIPKKU \times IIPKKU) + (Wsatlinmas \times Isatlinmas) + (Wkebakaran \times Ikebakaran) + (Wbencana \times Ibencana)$	Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
18	Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	Untuk mendapatkan gambaran mengenai kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	$IKLHD = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ IKLHD = indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten IPA = indeks Kualitas air IPU = indeks Kualitas udara ITH = indeks tutupan hutan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	Penghitungan IKLHD terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
19	Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	Untuk mengukur tingkat mutu dan pelayanan infrastruktur	<small>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) = Nilai Persepsi Masyarakat yang Terpenuhi</small>	BAPPERIDA Kota Samarinda	
20	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Mewakili Akuntabilitas Kinerja Secara Holistik, SAKIP mengukur perencanaan, pelaksanaan,	Nilai Hasil AKIP = nilai hasil evaluasi komponen perencanaan + komponen pengukuran + komponen pelaporan + komponen evaluasi	LHE Menpan	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
				pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Selain itu, Nilai SAKIP mencerminkan seberapa baik Pemerintah Daerah menelaraskan anggaran dengan hasil pembangunan yang nyata			
21	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	Mendukung percepatan transformasi digital nasional dan pengimplementasian Arsitektur Pemerintahan Digital Tahun 2025-2029	Indeks Domain = Σ (Nilai Indikator \times Bobot Indikator). Indeks Total = Σ (Indeks Domain \times Bobot Domain)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
22	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	Untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah	Penilaian Internal (0,305) + Penilaian Eksternal (0,328) + Penilaian Ekspert (0,367) – Faktor Koreksi (0,2)	KPK, Inspektorat Daerah Kota Samarinda	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	$\text{Nilai Indeks} = \sum (\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 68 TAHUN 2025
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
 TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	HLS menggambarkan akses terhadap pendidikan : (1).HLS menunjukkan rata-rata jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada usia masuk sekolah, jika sepanjang hidupnya mengikuti pola partisipasi pendidikan yang berlaku saat ini. (2). Indikator ini dapat mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan formal	Harapan lama sekolah pada umur i di tahun t ————— \times 100 % : Jumlah Penduduk Usia i yang bersekolah pada tahun t	Diras Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD Sederajat	%	APK SD merupakan Indikator pemerataan akses pendidikan : (1). APK dapat menunjukkan sejauh mana seluruh anak, tanpa memandang usia, memiliki akses ke pendidikan dasar. (2) Jika APK melebihi atau lebih dari 100%, berarti hampir semua anak usia sekolah dasar sudah bersekolah, meskipun ada yang lebih tua/muda dari usia ideal.	Jumlah murid SD Sederajat ————— \times 100 % Jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan	Diras Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Pemangku Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP Sederajat	%	APK SMP menggambarkan pemerataan akses pendidikan : (1). APK membantu melihat apakah anak-anak di semua kelompok sosial, ekonomi, dan wilayah sudah mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah di SMP. (2). Nilai yang rendah menandakan masih ada anak usia SMP yang tidak bersekolah, sedangkan nilai tinggi (mendekati/lebih dari 100%) menandakan akses lebih merata.	Jumlah murid SMP Sederajat ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 13-15 tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	APK PAUD menggambarkan akses pendidikan sejak dini : (1). APK PAUD menunjukkan berapa banyak anak usia 3-6 tahun (bahkan yang di luar usia ideal) sudah mengakses layanan pendidikan anak usia dini (TK/RA/PAUD). (2). Membantu melihat sejauh mana layanan PAUD sudah menjangkau seluruh anak usia dini, karena masa usia dini adalah "golden age" perkembangan anak.	Jumlah murid PAUD Sederajat ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 3-6 tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Kesetaraan	%	APK Kesetaraan menggambarkan akses pendidikan nonformal : (1). APK Kesetaraan menunjukkan berapa banyak penduduk usia sekolah maupun di luar usia sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan. (2). Indikator ini penting karena pendidikan tidak hanya ditempuh melalui jalur formal, tetapi juga jalur nonformal bagi mereka yang tidak sempat/tidak bisa bersekolah.	Jumlah murid Kesetaraan (Paket A/B/C) ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kab/Kota yang bersangkutan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
		Skor Kemampuan Literasi	Nilai	Skor Kemampuan Literasi mengukur kualitas hasil belajar, bukan sekadar akses : (1). Berbeda dengan APK atau APM yang menekankan partisipasi, skor literasi mengukur sejauh mana peserta didik benar-benar memahami bacaan dan mampu menggunakannya dalam kehidupan	Rapor Pendidikan (Hasil Asesmen Nasional)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Perjelasan		Pebangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				sehari-hari. (2) Skor ini penting untuk memastikan pendidikan tidak hanya kuantitas (jumlah siswa bersekolah), tetapi juga kualitas.		
		Skor Kemampuan Numerasi	Nilai	Skor Kemampuan Numerasi mengukur kualitas pembelajaran matematika dasar - (1). Skor numerasi menunjukkan sejauh mana peserta didik mampu memahami konsep bilangan, operasi hitung, pola, dan pemecahan masalah sehari-hari. (2). Indikator ini penting karena numerasi adalah keterampilan dasar yang melasari berbagai bidang ilmu.	Rapor Pendidikan (Uraian Asesmen Nasional)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Persentase Balita Gizi Kurang yang Mendapatkan Makanan Tambahan	%	Pemangaran Balita wasting (Gizi Kurang) merupakan bagian dari pencegahan stunting. Wasting pada anak dapat dicegah melalui pemberian makanan yang tepat dan edukasi, salah satunya adalah PMT Lokal	Jumlah balita gizi kurang usia 6 - 59 bulan yang mendapatkan makanan tambahan berbahan pangan lokal / Jumlah seluruh balita gizi kurang usia 6 - 59 bulan x 100 %	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
		Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	Ibu Hamil yang sehat menjadi dasar untuk melahirkan bayi yang sehat. Kesehatan ibu hamil dipantau melalui pelayanan Antenatal Care (ANC) sebanyak 6 kali selama kehamilan. Pelayanan ANC yang lengkap diharapkan akan meningkatkan kesehatan dan gizi ibu hamil.	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal ke di suatu wilayah dalam satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin pada wilayah dan tahun yang sama X 100	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
		Persentase Deteksi Dini Tuberculosis	%	Pelayanan di fasilitas pelayanan harus memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien. Dengan pelayanan yang sesuai standar tersebut dapat menemukan penderita Tuberculosis secara klinis dan laboratorium dari antara terduga Tuberculosis. Dengan ditemukannya penderita Tuberculosis tersebut fasilitas kesehatan dapat	Jumlah orang terduga TB yang dilayani sesuai standar / Jumlah terduga TB x 100 %	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode	Basaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				menatalaksanaan penyakit TB sesuai dengan standar pelayanan pengobatan Tuberculosis. Indikator ini sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia yakni menargetkan eliminasi TB tahun 2030 - 2035, dengan percepatan penurunan kasus maka semakin cepat pula pengobatan sehingga risiko penularan TB di masyarakat akan menurun.		
		Persentase Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	Pelayanan di fasilitas pelayanan harus memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien dengan standar akreditasi yang telah ditetapkan meliputi layanan kritis, manajemen maupun administrasinya, dengan akreditasi fasilitas kesehatan dapat memberikan jaminan perlindungan keamanan layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang ada. Kewajiban akreditasi bagi fasilitas kesehatan tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2022 tentang akreditasi.	Jumlah Fasilitas terakreditasi / Jumlah Fasilitas yang ada di kota Samarinda x 100	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
		Persentase Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	Peningkatan Kompetensi -- Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan 1) Pengetahuan dan keterampilan lebih baik: Tenaga kesehatan yang terlatih mampu memberikan diagnosis lebih akurat, tindakan lebih tepat, serta pelayanan yang sesuai standar medis. 2) Pelayanan lebih aman dan bermutu: Kesalahan medis berkurang, penggunaan obat lebih rasional, dan penerapan evidence-based practice meningkat. 3) Kepuasan pasien meningkat: Pasien merasa lebih percaya dan puas karena dilayani oleh tenaga yang kompeten, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas.	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / Jumlah Tenaga Kesehatan x 100	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Kesehatan.</p> <p>1) Distribusi layanan lebih merata: Tenaga kesehatan yang kompeten dapat ditempatkan di daerah-daerah pedesaan, sehingga mutu pelayanan di daerah tersebut tidak tertinggal jauh dibandingkan perkotaan.</p> <p>2) Mengurangi kesenjangan antar wilayah: Kompetensi yang seragam melalui pelatihan standar nasional/berkelanjutan membuat pelayanan kesehatan lebih konsisten di seluruh wilayah kota Samarinda.</p> <p>3) Penguatan layanan primer: Dengan kompetensi yang memadai, tenaga kesehatan di puskesmas mampu menyelesaikan sebagian besar masalah kesehatan masyarakat tanpa harus selalu merujuk ke rumah sakit besar.</p>		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase luasan wilayah banjir	%	<p>1. Meningkatnya kebutuhan air untuk konsumsi domestik, industri, dan pertanian memerlukan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang efektif.</p> <p>2. Keterbatasan sumber daya air memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang efektif untuk memastikan ketersediaan air yang memadai.</p> <p>3. Dampak perubahan iklim seperti perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu memerlukan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang adaptif.</p> <p>4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat memerlukan akses terhadap air yang bersih dan aman, sehingga pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang efektif sangat penting.</p> <p>5. Pengembangan ekonomi</p>	(Luasan Wilayah yang Terendam Banjir/bias wilayah banjir)X100	Unitas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				memerlukan ketersediaan air yang memadai untuk kegiatan industri dan pertanian, sehingga pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang efektif sangat penting. 6. Tidak berkurangnya luas wilayah banjir		
	Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas pada kawasan perkotaan	Persentase luas kawasan perkotaan yang terlayani fasilitas dasar	%	1. Perencanaan yang kurang tepat dapat menyebabkan kurangnya fasilitas dasar pada kawasan perkotaan 2. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan kebutuhan fasilitas dasar meningkat, namun tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang memadai	Jumlah Kelurahan yang terlayani fasilitas dasar / Jumlah Kelurahan x 100	Disas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan dari pusat produksi ke pusat kegiatan	Persentase pertumbuhan panjang jalan yang dibangun	%	1. Meningkatnya aktivitas ekonomi memerlukan konektivitas jaringan yang baik untuk memfasilitasi transportasi barang dan jasa. 2. Perkembangan teknologi seperti teknologi informasi dan komunikasi memerlukan konektivitas jaringan yang baik untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi. 3. Meningkatnya mobilitas masyarakat memerlukan konektivitas jaringan yang baik untuk memfasilitasi transportasi orang dan barang. 4. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara memerlukan konektivitas jaringan yang baik untuk memfasilitasi transportasi dan komunikasi.	Panjang jalan yang dibangun / Total panjang rencana jalan dibangun x 100	Disas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak	%	Digunakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah RLH Di Kota Samarinda dibagi Jumlah Rumah Di Kota Samarinda	Disas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
	Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman layak yang berkualitas	Persentase peningkatan infrastruktur permukiman yang layak	%	Digunakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	capaian peningkatan pelayanan dibagi target akhir peningkatan pelayanan	Diras Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	Karena Persentase penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah ukuran tingkat keberhasilan Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Rata-rata nilai persentase dari outcome Program: 1. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan 2. Persentase Penyelenggaraan Tibantraumias 3. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat 4. Persentase PNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Satuan Polisi Pamorog Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	Meningkatkan Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat ukur kapasitas pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah yang memuat semua parameter ketahanan daerah terhadap bencana seperti penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, penanganann tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta pengembangan sistem penulutan bencana	$I = C / M$ Nilai Capaian Indikator yg ada di Daerah dibagi Nilai Capaian Maksimum seluruh Indikator	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	Meningkatkan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	Sebagai instansi pelayanan urusan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ingin memastikan seluruh aduan, laporan maupun permintaan masyarakat terkait pencegahan, pengendalian pemadaman penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dapat terlayani secara maksimal	Jumlah Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran DIHAGI Jumlah aduan masyarakat terkait Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran DIKALI 100	Diras Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
	Memingkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	Ukuran keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan Rencana Kementerian Sosial 2025-2029	$(Dimensi 1 \times 0,27) + (Dimensi 2 \times 0,31) + (Dimensi 3 \times 0,42)$	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
	Memingkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	%	Karena Tingkat Kesempatan Kerja secara langsung menunjukkan proporsi angkatan kerja yang terserap dalam pasar kerja. Semakin tinggi nilai indikator tersebut, semakin besar pula penduduk usia kerja yang memperoleh pekerjaan, sehingga dapat mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam membuka dan memperluas lapangan kerja.	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	Memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase Peningkatan pemberdayaan melalui lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	%	Persentase Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui LPLPP adalah indikator yang mengukur persentase perubahan (menaikkan jumlah atau capaian) kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) dalam kurun waktu tertentu (umumnya per tahun).	$\frac{\text{Jumlah Komponen Standardisasi LPLPP yang terpenuhi}}{\text{Jumlah Komponen Standardisasi sesuai Borang LPLPP}} \times 100$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
		Kota Layak Anak	Poin	Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak yang diadopsi oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota), dengan tujuan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. KLA bukan hanya label, tapi merupakan proses transformasi sistematis agar kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di	Peringkat KLA: Kategori pertama, Madya, Nisya, Utama, Kota Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				daerah mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak		
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	IPA adalah Indeks yang mengukur sejauh mana hak anak terpenuhi dan anak-anak yang terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi	Capaian tahunan dimensi Hak Sipil dan Kebebasan (Bobot 20%), Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Bobot 22%), Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Bobot 18%), Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Bobot 18%), Perlindungan Khusus (Bobot 22%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (Beras)	%	Memberikan gambaran kuantitatif mengenai kecukupan pasokan pangan (beras) baik dari produksi lokal maupun cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kota Samarinda, dari mengantisipasi terhadap potensi masalah pasokan pangan. Ketersediaan pangan yang cukup akan berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan secara langsung mendukung ketahanan pangan nasional	Jumlah Cadangan Pangan (CIP + CPM + Produksi) dibagi Jumlah Kebutuhan Pangan. Dilaki 100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
	Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan, melainkan dari hasil (outcome) yang nyata terhadap kualitas lingkungan. Indeks Kualitas udara, air, dan lahan merupakan ukuran langsung yang dapat mencerminkan tingkat keberhasilan daerah dalam menjaga kualitas lingkungan. Indeks Kualitas Udara menggambarkan kualitas udara ambien dan risiko kesehatan masyarakat.	Indeks Kualitas Air (IKA) https://ppkd.merilik.go.id/website/	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	Indeks Kualitas Air menunjukkan tingkat pencemaran dan ketersediaan sumber daya air bagi	Indeks Kualitas Udara (IKU) https://ppkd.merilik.go.id/website/	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				kehidupan dan pembangunan. Indeks Kualitas Lahan mencerminkan kondisi daya dukung dan daya tampung lahan, termasuk degradasi dan lahan kritis.		
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	Dengan meniadakan ketaguya, maka indikator Kinerja Utama akan lebih komprehensif dan berimbang dalam merepresentasikan kondisi lingkungan hidup serta akan memperlihatkan bahwa kinerja daerah selaras dengan agenda nasional maupun global, termasuk SDGs, komitmen perubahan iklim, serta pembangunan kota berkelanjutan. Ketiga indeks tersebut telah memiliki metodologi baku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif. Data pemantauan rutin tersedia dari KLHK serta dapat dimintegrasikan dengan data daerah, sehingga pelaporan kinerja lebih terstandar, obyektif, dan terbanding. Kualitas udara, air, dan lahan adalah isu utama yang berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat, ketahanan ekosistem, dan daya dukung pembangunan.	Indeks Kualitas Lahan (IKL) https://ppkl.menlhk.go.id/website/	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. Kinerja pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan,	Sigma Indeks Pengelolaan/Pemerintahan (governance) dan Indeks Efektivitas dan Efisiensi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode	Besaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				pembinaan, teknis dan peran serta masyarakat. Kinerja pengelolaan sampah sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat. Komponen-komponen kinerja yang diulas dalam RKPS, (i) governance atau pemerintahan dan (ii) efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah.		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	Digunakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 untuk Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan Sasaran Walikota Samarinda untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (KPP) Kota Samarinda.	Hasil perhitungan lewat aplikasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Kelurahan SWASEMBADA	%	Ukuran keberhasilan pembangunan desa/kelurahan ditinjau dari sisi kemandirian desa/kelurahan	Jumlah kelurahan SWASEMBADA dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	Meningkatnya Pembangunan Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga 5-Bangga	Indeks	1. Mendukung Misi 1 RPJMD Kota Samarinda 2025-2029, yakni : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing. 2. 5-Bangga menentukan level pembangunan keluarga dan menjadi indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan keluarga di suatu wilayah. 5-Bangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Keberhasilan menuju	Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu : (a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain: (1) Kegiatan Ibadah; (2) Legalitas Keluarga; (3) Jaminan Kesehatan; (4) Jaminan Keuangan; dan (5) Keharmonisan Keluarga; (b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain : (1) Pemenuhan kebutuhan dasar; (2) Keberlangsungan Pendidikan; (3) Kesehatan Keluarga; (4) Akses Informasi; (c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain : (1) Interaksi Keluarga; (2) Interaksi Sosial Formula 5-Bangga : 5-Bangga = 1/3 (Indeks Ketentraman + Indeks Kemandirian + Indeks Kebahagiaan) x 100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode	Barisan	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya menuju generasi emas di 2045 berawal dari keluarga.		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
	Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas Kota	Nilai	dalam mendukung terwujudnya Misi Walikota ke 3 dalam Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur maka perlunya kualitas keselamatan dan kualitas layanan transportasi di ukur dalam hal transportasi menggunakan Rasio Konektivitas Kota sebagai indikator kinerja Utama Dinas perhubungan menjadi alasan yaitu 1. Mengukur Aksesibilitas Kota 2. dasar perencanaan Infrastruktur 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi 4. Meningkatkan efisiensi Mobilitas 5. indikator keadaan Akses transportasi 6. Mendukung kota Berkelanjutan 7. sebagai Ukuran Kinerja Pemerintah Daerah	$(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, darat dan penyeberangan}) = (IK1 \times 70) + (IK2 \times 30)$	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Karena keterbukaan informasi menjadi dasar penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintah. Melalui keterbukaan ini, masyarakat dapat memperoleh data dan informasi secara mudah, cepat, serta terpercaya dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, nilai IKIP tidak hanya menggambarkan kepatuhan instansi terhadap aturan keterbukaan informasi, tetapi juga menunjukkan sejauh mana transformasi digital mampu meningkatkan mutu layanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menumbuhkan	Perhitungan IKIP dengan gabungan penilaian (skor kuesioner dan penilaian data objektif digabungkan dengan menggunakan formula yang mempertimbangkan bobot masing-masing)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MEKENGGAH					
	Memberdayakan dan mengembangkan koperasi	Persentase Peningkatan koperasi Sehat	%	Guna Penguatan Ekonomi Kerakyatan sebagai pondasi ekonomi kota, yang mandiri, dan koperasi yang berkembang mampu menyediakan lapangan kerja lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	Jumlah Koperasi sehat tahun N / Jumlah koperasi aktif X 100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	Memberdayakan dan mengembangkan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	%	Memberdayakan dan mengembangkan UMKM sebagai investasi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan tangguh. Sebagai sektor yang dapat tumbuh cepat, UMKM memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	Jumlah Usaha Mikro Tahun N / Jumlah keseluruhan usaha mikro X 100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
	Meningkatkan Capaian Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	%	Sebagai Salah Satu Upaya dalam Mewujudkan Kota Samarinda Sebagai tujuan investasi dengan meningkatkan pengembalian potensi investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	(Jumlah investasi tahun n dikurangi dengan jumlah investasi tahun n-1) dibagi dengan jumlah investasi tahun n-1 dikali 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
	Meningkatnya Daya Saing Perempuan, Pemuda dan Anak	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ditetapkan sebagai indikator kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Samarinda karena indikator ini secara komprehensif menggambarkan kualitas dan daya saing pemuda melalui aspek pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi, serta kesetaraan gender dan sejalan dengan tugas dan fungsi dinas dalam meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan peran strategis	Indeks Domain Pendidikan + Indeks Domain Kesehatan dan Kesejahteraan + Indeks Domain Tenaga Kerja + Indeks Domain Partisipasi Kepemimpinan + Indeks Gender dan Diskriminatif / 5	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				pemuda dalam pembangunan daerah.		
		Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	Indeks	IPO relevan sebagai IKU karena olahraga bukan hanya aktivitas fisik, melainkan juga sarana strategis meningkatkan kesehatan, karakter, serta kompetensi perempuan, pemuda, dan anak untuk mendukung peningkatan daya saing.	$IPO = (D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8 + D9) / 9$ Keterangan : D1 = Dimensi IPO pertama D2 = Dimensi IPO kedua dan seterusnya	Disas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIKA					
	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	Karena IPS mengukur tingkat perkembangan sistem statistik, mulai dari aspek kelembagaan, sumber daya, metodologi, hingga kualitas data yang dihasilkan. Melalui IPS dapat dilihat sejauh mana penyelenggaraan statistik memenuhi prinsip akurasi, konsistensi, dan keterhandingan sehingga data yang disajikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, capaian IPS bukan hanya mencerminkan kualitas teknis pengolahan data, tetapi juga menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan statistik yang terpercaya sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi kebijakan publik.	Penghitungan indeks berdasarkan 5 (lima) domain yaitu prinsip SDI, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional	Disas Komunikasi Dan Informatika Kota Samarinda
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
	Merangkatnya Keamanan informasi	Tingkat kesiapan pengumuhan informasi pemerintah daerah	%	Karena indikator ini mampu menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah memiliki sistem, kebijakan, infrastruktur, dan sumber daya yang memadai untuk melindungi data serta layanan digital dari ancaman siber. Dengan mengukur kesiapan tersebut, dapat dipastikan bahwa upaya pengumuhan informasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Hal ini penting	Jumlah hasil nilai Indeks KAMI dibagi jumlah nilai keseluruhan (maksimal) atas penilaian yaitu 645, dikali 100%	Disas Komunikasi Dan Informatika Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				agar kepercayaan publik terhadap layanan digital terjaga, risiko kebocoran data dapat diminimalkan, serta transformasi digital di daerah berjalan dengan aman, andal, dan berkesinambungan.		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
	Meningkatnya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Skor	IPK selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) : (1). Dimensi kebudayaan mendukung pencapaian SDGs, terutama dalam pendidikan berkualitas, kota dan permukiman berkelanjutan, serta kerja layak dan pertumbuhan ekonomi. (2). IPK membantu mengaitkan pembangunan kebudayaan dengan agenda global.	IPK adalah penghitungan nilai indeks Dimensi. Dikelompokkan jadi 7 dimensi, yaitu Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
	Meningkatnya kegemaran membaca dan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	- Selaras dengan Misi R/UMD Kota Samarinda 2025-2029, idyasinya Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing. Literasi masyarakat merupakan pondasi peningkatan kualitas pendidikan dan budaya membaca. - Indikator resmi nasional yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI dan dikomodikan dalam Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - Mengukur dampak nyata (outcome) program perpustakaan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, baik dari sisi akses informasi, literasi digital, maupun partisipasi dalam kegiatan literasi; - Menjadi kontribusi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap pencapaian indikator makro daerah, yaitu Indeks	$IPLM \text{ Kab/Kota} = \frac{\sum_{i=1}^7 (UPLM)_i}{7} \times 100$ UPLM1 - pemerataan Layanan Perpustakaan (jumlah perpustakaan ÷ jumlah kecamatan) UPLM2 - Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (jumlah koleksi ÷ 2 x jumlah populasi penduduk) UPLM3 - Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (Kasio jumlah tenaga perpustakaan dengan populasi adalah 1:2500) UPLM4 - Tingkat Kungungan masyarakat ke Perpustakaan (Persentase jumlah kunjungan perpustakaan per hari sebesar 2% dari populasi penduduk) UPLM5 - Perpustakaan yang dibina sesuai standar (jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 22,09% dari keseluruhan jumlah perpustakaan) UPLM6 - Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan (Persentase jumlah masyarakat yang terlibat di sosialisasi perpustakaan sebesar 2% dari populasi penduduk)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	Formulasi	7
				Pembangunan Manusia (PM), melalui jalur pendidikan non-formal dan peningkatan budaya baca.	UPLM7 = Anggota Perpustakaan (Persentase jumlah anggota perpustakaan sebesar 2% dari populasi penduduk) AM = Aspek Masyarakat	
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
	Meningkatnya Pengelolaan Arsip secara Baik	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	- Selaras dengan Misi 5 RPJMD Kota Samarinda 2025-2029, yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Akuntabel. Kualitas kearsipan merupakan bagian penting dari akuntabilitas dan transparansi pemerintahan; - Indikator resmi dari Arsip Nasional RI (ANRI) sesuai UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, PP No. 28 Tahun 2012, dan Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan; - Mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan arsip pada perangkat daerah, sehingga berfungsi sebagai tolok ukur kerja pembinaan Disarsip; - Mendukung peningkatan skor Reformasi Birokrasi, AKIP, dan Indeks Integritas Pemerintah, yang menjadi indikator makro tata kelola pemerintahan Kota Samarinda; - Menjadi tolok ukur kontribusi Disarsip dalam pengendalian risiko hukum, administrasi, dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota.	$IHKpd = 0,6 NHp + 0,4 NHI$ IHKpd = Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah NHp = Nilai Hasil Pengawasan dan Kearsipan Eksternal NHI = Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Ton	sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 83/KEPMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap ditambah Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				bertujuan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan Indikator Kinerja Utama KKP agar selaras dengan upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan meningkatkan efisiensi dalam proses perikanan usaha perikanan tangkap.		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
	Meningkatnya peran sektor unggulan dan investasi daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB	%	Penggunaan indikator kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB ADHB dipilih karena pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari perdagangan, jasa transportasi, kuliner, hingga ekonomi kreatif yang memberi efek pengganda bagi perekonomian daerah. Dengan menjadikan indikator ini sebagai acuan, pemerintah dapat menilai secara komprehensif sejauh mana sektor pariwisata berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Selain itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Pariwisata yang telah tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pariwisata Daerah, sehingga penggunaan indikator ini semakin relevan untuk mendukung program peningkatan peran sektor unggulan dan investasi daerah	Total Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB dibagi dengan Total PDRB berlaku x 100%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
		Cakupan peningkatan kapasitas SUM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	%	Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki kontribusi strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Melalui peningkatan kapasitas, kompetensi, dan keterampilan pelaku usaha pariwisata maupun ekonomi kreatif, akan tercipta SDM yang lebih produktif, inovatif, dan	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas pada tahun n di bagi jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif di kali 100	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				berdaya sang. Hal ini mendorong berkembangnya pejuang kerja baru, peningkatan wirausaha mandiri, serta optimalisasi potensi daerah yang pada akhirnya memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (gala)	Ton/Ha	Sebagai tolak ukur efektivitas dan efisiensi penggunaan benih, pupuk dan teknologi guna memastikan produktivitas per hektar yang berkontribusi terhadap peningkatan produksi dan ketersediaan pangan (beras) sebagai pangan pokok masyarakat, yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan dan dan kesejahteraan petani dan secara langsung mendukung ketahanan pangan daerah	Jumlah Produksi Pertanian Pangan per hektar per tahun dibagi luas panen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
		Persentase Pemantauan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyakit Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan. Indikator ini menjadi tolak ukur keberhasilan program pengendalian penyakit dengan mematuhi tren pemantauan risiko penyakit hewan menular strategis.	Jumlah Kejadian Penyakit/kasus tahun berjalan (t)-Jumlah Kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dibagi Jumlah Kejadian /Kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dikali 100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	Penggunaan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dipilih sesuai dengan amanah INMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2025 terkait Indikator Urusan Bidang Perdagangan	Distribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
	Tujuan : Meningkatkan peran sektor unggulan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	Pembangunan industri menjadi tulang punggung pertumbuhan	Kontribusi Industri Pengolahan / Total PDRB ADHB X 100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
	dalam pertumbuhan ekonomi			ekonomi. Lonjakan/pertumbuhan pembangunan industri memercanakan transformasi struktural di mana daerah-daerah bergerak dari ekonomi berbasis agraris menuju ekonomi manufaktur dan teknologi tinggi. Pembangunan industri menghadirkan peluang strategis—dengan mendorong hilirisasi, menciptakan nilai tambah, dan memperkuat ketahanan ekonomi kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan Imendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					
	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan	Nilai	Karena nilai AKIP komponen Pelaporan merupakan salah satu bagian dari evaluasi atau implementasi SAKIP	Nilai Hasil Keleluasan AKIP Pemerintah pada Komponen Pelaporan	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota	Indeks	Untuk menunjukkan tingkat keberhasilan instansi pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik pada masyarakat	Nilai IKM Pemkot = Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah atau Unit Kerja / Jumlah Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks	Untuk mengukur tingkat koordinasi dan fasilitasi kebijakan, serta merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi Kebijakan	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
4.02	SEKRETARIAT DPRD					
	Meningkatnya Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	Sesuai dengan Imendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis	Total Angka Tingkat Kepuasan / jumlah responden x 100%	Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Perangkoat Daerah Tahun 2025-2029		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5.01	PERENCANAAN					
	Memingkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	Karena nilai SAKIP komponen Perencanaan Kinerja merupakan salah satu bagian dari evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja	Pemberian Penilaian Atas Akap Kota Samarinda dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Indikator Perencanaan Kinerja bobot 30 %	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
		Nilai SAKIP komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	karena nilai SAKIP komponen Pengukuran Kinerja merupakan salah satu bagian dari evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja serta untuk melakukan pengukuran kinerja secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah	Pemberian Penilaian Atas Akap Kota Samarinda dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Indikator Pengukuran Kinerja Bobot 30 %	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
5.02	KEUANGAN					
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Indeks	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) sebagai indikator sasaran "Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel" adalah karena opini BPK merupakan tolok ukur utama yang diakui secara nasional dalam menilai tingkat kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Opini BPK diberikan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan menjadikan opini BPK sebagai indikator, Pemerintah Daerah melalui BPKAD mendorong untuk terus meningkatkan kualitas	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	Formulasi	6
				pengelolaan keuangan daerah, memperkuat pengendalian internal, serta menertibkan administrasi dan pemanfaatan aset daerah. Indikator ini juga mencerminkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan kualitas pelayanan publik.		
	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebagai indikator Kinerja Utama karena mencerminkan kemandirian fiskal daerah, relevan dengan tugas pokok perangkat daerah pengelola pendapatan, serta berkontribusi langsung pada peningkatan kapasitas fiskal untuk mendukung prioritas pembangunan dan pelayanan publik.	Total Realisasi PAD dibagi Total Target PAD dikali 100	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5.03	KEPEGAWAIAN					
	Terwujudnya ASN yang Profesional, berintegritas dan akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Indeks Profesionalitas ASN digunakan sebagai indikator karena mampu menggambarkan secara komprehensif kualitas aparatur dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Keempat dimensi tersebut menjadi ukuran utama dalam menilai sejauh mana ASN bekerja secara profesional, berintegritas, dan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan pengukuran melalui indeks ini, pemerintah daerah dapat memantau tingkat profesionalitas ASN secara objektif serta menjadikannya dasar dalam merumuskan ketajukan pengembangan sumber daya	Berdasarkan aspek penghitungan IP ASN pada peraturan BKN RI No 8 Tahun 2019 tentang Pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran IP ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				manusia aparatur agar lebih efektif, adaptif, dan berdaya saing.		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	Terwujudnya ASN yang Profesional, berintegritas dan akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Indeks Profesionalitas ASN digunakan sebagai indikator karena mampu menggambarkan secara komprehensif kualitas aparatur dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Keempat dimensi tersebut menjadi ukuran utama dalam menilai sejauh mana ASN bekerja secara profesional, berintegritas, dan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan pengukurannya melalui indeks ini, pemerintah daerah dapat memantau tingkat profesionalitas ASN secara objektif serta menjadikannya dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur agar lebih efektif, adaptif, dan berdaya saing.	Berdasarkan aspek penghitungan IP ASN pada peraturan BKN RI No 8 Tahun 2019 tentang Pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran IP ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	karena Indeks Inovasi Daerah mampu menggambarkan kualitas inovasi yang dihasilkan pemerintah daerah secara objektif, komprehensif, dan diakui secara nasional.	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi / (Jumlah total perangkat daerah * 100%)	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					
	Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan AFP guna memperkuat pengendalian internal, memberikan keyakinan memadai atas ketepatan dan prinsip JE (ekonomis, efisien, dan efektif), mendorong efektivitas manajemen	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan, Dasar hukum:	Hasil Evaluasi BPKP Atas Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP	Inspekturat Daerah Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
	risiko serta pencegahan korupsi			-PP 60 Tahun 2008 -Perka BPKP 5 Tahun 2021		
		Kapabilitas APSP	Nilai	Kemampuan APSP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Dasar hukum: -PP 60 Tahun 2008 -Perka BPKP 8 Tahun 2021	Hasil Evaluasi BPKP Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APSP	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
		Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Nilai	Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Dasar hukum: -PP 60 Tahun 2008 -Perka BPKP 5 Tahun 2021	Hasil Evaluasi BPKP Atas Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SIP Terintegrasi oleh BPKP	Inspektorat Daerah kota Samarinda
		Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Indeks	Kerangka pengaliran atau kemampuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. Dasar hukum: -PP 60 Tahun 2008 -Perka BPKP 5 Tahun 2021	Hasil Evaluasi BPKP Atas Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SIP Terintegrasi oleh BPKP	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
7	UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN PALARAN					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat. 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Melalui 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwasi Samarinda No. 38 Tahun 2023	Kecamatan Palaran

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.		
7.01	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029, 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Melalui 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	Kecamatan Samarinda Seberang
7.01	KECAMATAN SAMARINDA ULU					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029, 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Melalui 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	Kecamatan Samarinda Ulu
7.01	KECAMATAN SAMARINDA ILIR					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Melalui 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik,	Kecamatan Samarinda Ilir

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Publik (IPP) merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023	5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023	
7.01	KECAMATAN SAMARINDA UTARA					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	Hasil Pemilihan dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Melalui 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023	Kecamatan Samarinda Utara
7.01	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	Hasil Pemilihan dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Melalui 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023	Kecamatan Sungai Kunjang

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Terakhir Melalui Permempuan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.		
7.01	KECAMATAN SAMBUTAN					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029, 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Peraturan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permempuan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Peraturan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permempuan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	Kecamatan Sambutan
7.01	KECAMATAN SAMARINDA KOTA					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029, 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Peraturan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permempuan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Peraturan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permempuan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	Kecamatan Samarinda Kota
7.01	KECAMATAN SUNGAI PINANG					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik,	Kecamatan Sungai Pinang

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	
7.01	KECAMATAN LOA JANAN ILIR					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029, 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	Kecamatan Loa Janan Ilir
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial	%	Indikator ini dipilih untuk mengukur jumlah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial- $(P1 + P2 + P3 + P4 + P5) / 5 \times 100$ P1 = Persentase Program 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	Formulasi	7
	Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial		Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial Kehangsaan	<p>P2 = Persentase Program 2 P3 = Persentase Program 3 P4 = Persentase Program 4 P5 = Persentase Program 5</p> <p>P1 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dibagi target peserta x 100% P2 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Lingkungan Politik dibagi target peserta x 100% P3 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Ormas dibagi target peserta x 100% P4 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada pelaku ekonomi, sosial, budaya, dan agama dibagi target peserta x 100% P5 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam penyelesaian konflik dibagi target jumlah masyarakat yang berpotensi terlibat konflik di kadir 100%</p>	



WALIKOTA SAMARINDA,

[Signature]
PANDI HARUN

**PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,05 Indeks	4,29 Indeks	105,93 %



Samarinda, 30 Januari 2026
Camat Samarinda Seberang,

ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 198607232004121003